



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN AKADEMIK

PRODI SARJANA - FAKULTAS HUKUM

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta



2024/
2025





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR 24/UN61/FH/TU/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memenuhi administrasi akademik yang lebih efektif, efisien, dinamis dan teratur di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, perlu dibuat Pedoman Akademik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun Akademik 2024/2025.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 744/UN61.0/KP.09.00/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Periode Tahun 2023-2027 a.n. Dr. Suherman, SH., LLM.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Pedoman Akademik ini berlaku untuk Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Angkatan 2024 di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat keputusan Dekan ini akan di atur dalam ketentuan lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2024/2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024



Dekan,

Dr. Suherman, SH., LL.M.
MP 197006022021211004

KATA PENGANTAR

Segala puji dipanjatkan kepada Alloh SWT yang atas bimbingan-Nya Buku Pedoman Akademik bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta ini dapat diselesaikan.

Buku ini merupakan Buku Pedoman Akademik yang berlandaskan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2024 yang berlaku bagi mahasiswa yang aktif di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Pedoman Akademik ini merupakan wujud komitmen Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPN “Veteran” Jakarta untuk memberikan pendidikan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada pengembangan diri serta peningkatan kapasitas intelektual para mahasiswa. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program studi, kurikulum, persyaratan akademik, dan harapan dari program sarjana hukum ini.

Buku Pedoman Akademik ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap sivitas akademika khususnya bagi mahasiswa karena selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, para mahasiswa memerlukan informasi tentang berbagai hal yang termuat dalam buku ini meliputi: kurikulum; peraturan akademik dan tata tertib; manajemen FH UPNVJ; dosen; informasi umum FH UPNVJ; sarana dan prasarana serta informasi terkini berkembangnya FH UPNVJ sampai dengan saat ini.

Akhir kata, kami berharap agar Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta ini menjadi panduan yang bermanfaat dan menginspirasi setiap mahasiswa dalam menggapai kesuksesan akademik. Mari bersama-sama



berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera melalui pemahaman dan penerapan ilmu hukum yang benar dan berintegritas.

Selamat bergabung dalam Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Semoga perjalanan akademik Anda penuh keberhasilan dan kebahagiaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Lembaga/Institusi.....	1
B. Langkah Perkembangan.....	1
C. Kerja Sama	2
D. Prospek dan Tantangan	3
BAB II	
KELEMBAGAAN	5
A. Status Akreditasi	5
B. Visi.....	5
C. Misi	5
D. Tujuan.....	6
E. Struktur Organisasi.....	7
F. Rumpun Dosen.....	9
G. Lembaga Penunjang.....	12
H. Sarana dan Prasarana	12
I. Sistem Layanan Informasi Digital	13
BAB III	
SISTEM PENDIDIKAN	18
A. Program Studi dan Kurikulum	18
B. Deskripsi Mata Kuliah Kompetensi	43
C. Deskripsi Satuan Kredit Semester (SKS)	83



D.	Pembelajaran dan Pemantauan Studi	83
E.	Administrasi Akademik	87
BAB IV		
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM.....		101
A.	Keuangan	101
B.	Administrasi Umum.....	101
BAB V		
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI		105
A.	Pembinaan Mahasiswa	105
B.	Tujuan Pembinaan Kemahasiswaan.....	105
C.	Badan-Badan Kemahasiswaan.....	106
D.	Kesejahteraan Mahasiswa.....	108
E.	Alumni Dan Kemitraan Orang Tua.....	109
BAB VI		
PENUTUP.....		110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Lembaga/Institusi

Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPN “Veteran” Jakarta merupakan perubahan nama program studi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 418/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang sebelumnya bernama Program Studi S1 Ilmu Hukum (PSS1IH). Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 144/DIKTI/KEP/2000 tanggal 24 April 2000 PSS1IH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mendapatkan status terdaftar pada Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan program strata satu (S1). Sejak berdirinya, program studi ini berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum dalam rangka membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang hukum.

B. Langkah Perkembangan

Setelah resmi berdiri pada tahun 2000 selanjutnya pada tahun 2000 tepatnya tanggal 24 April 2000 berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 114/DIKTI/KEP/2000 program Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan UPN Veteran Jakarta menyandang status terdaftar. Pada tahun 2001, berdasarkan surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor: 038/BAN-PT/IV/2001, tanggal 25 Januari 2001 tentang peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta menjadi terakreditasi. Pada tahun 2004 dilaksanakan reakreditasi dan

berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional tanggal 17 Juni 2004 (BAN-PT Diknas) Nomor: 022/BAN-PT/AK-VIII/S1/VI/2004 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana PSS1IH Mem peroleh Predikat Akreditasi B pada pertama kalinya. Pada saat ini, predikat akreditasi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta masih berpegang pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor: 16/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta mendapat Peringkat B. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tanggal 6 Oktober 2014, UPN Veteran Jakarta berubah statusnya dari Perguruan Tinggi swasta ke Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan identitas Kampus Bela Negara. Sejak berdiri tahun 2000 sampai saat ini Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta telah meluluskan lebih dari 800 Sarjana Hukum yang saat ini telah mengabdikan diri berbagai institusi seperti Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan dan berkiprah sebagai praktisi lain di bidang hukum.

C. Kerja Sama

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik serta pengabdian di Program Studi Hukum Program Sarjana, FH UPN Veteran Jakarta telah melakukan beberapa kerja sama dengan fakultas hukum negeri maupun swasta, instansi pemerintahan baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu:

1. University of Economic and Law (UEL), Ho Chi Min City, Vietnam;

2. Faculty of Law University of Cebu, Philipine;
3. Kulliyah Syariah and Laws, Kolej Universiti Insaniah, Kedah Malaysia;
4. Faculty of Islamic Studies and Laws Fatoni University- Thailand;
5. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;
7. Fakultas Hukum Universitas Semarang;
8. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
9. Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul;
10. Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta;
11. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
12. Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY);
13. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN);
14. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
15. Badan Narkotika Nasional (BNN);
16. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
17. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan;
18. Pengadilan Militer;
19. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI); dan
20. Yayasan Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro
21. Fakultas Hukum Universitas Jambi
22. Fakultas Hukum Universitas Andalas
23. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
24. Fakultas Hukum Universitas Jember

D. Prospek dan Tantangan

Tantangan bidang hukum saat ini menuntut institusi pendidikan untuk menghadapi masalah luasnya lingkup bahasan ilmu hukum dengan perkembangan yang sangat cepat. Selain itu isu-isu global seperti perdagangan bebas tingkat regional Asia Tenggara maupun

dunia, Revolusi Industri 4.0 juga harus menjadi perhatian. Untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut Program Studi Hukum Program Sarjana, FH UPN “Veteran” Jakarta berupaya mempersiapkan mahasiswanya menjadi sarjana hukum yang diharapkan mampu bersaing di bidangnya dan memiliki karakter khusus yaitu bela negara. Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPN “Veteran” Jakarta diharapkan:

1. mampu merancang dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan baik;
2. mampu memecahkan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat;
3. mampu mengaplikasikan praktik beracara di pengadilan;
4. mampu melakukan penelitian dan pengabdian hukum pada masyarakat; dan
5. mampu mengaplikasikan teknologi dan bahasa asing sebagai bagian kompetensi hukum yang dimiliki.

Dengan demikian lulusan diharapkan dapat menempati bidang/instansi strategis di berbagai sektor seperti:

1. penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat);
2. konsultan hukum;
3. akademisi;
4. *legal officer* atau *human resource development* untuk perusahaan dan perbankan;
5. staf bidang hukum, kepegawaian, dan bidang lainnya pada instansi pemerintah; dan
6. Tentara Nasional Indonesia; dan
7. sektor-sektor lain yang membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi hukum.

BAB II

KELEMBAGAAN

A. Status Akreditasi

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4662/SK/BAN-PT/Ak-PNB/XI/2023 tertanggal 8 November 2023, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) mendapat peringkat BAIK SEKALI.

B. Visi

Visi Fakultas Hukum:

“Menjadi Fakultas Hukum yang unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia”

Visi Program Studi Hukum Program Sarjana:

“Menjadi Program Studi Hukum yang unggul, berkualitas Internasional, inovatif, berdaya saing, yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan beridentitas bela negara”

C. Misi

Misi Fakultas Hukum:

1. menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara serta berdaya saing;
2. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum di tingkat internasional yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara; dan
3. mengoptimalkan jejaring-jejaring dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam dan luar negeri.

Misi Program Studi Hukum Program Sarjana:

1. menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara;
2. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum di tingkat internasional yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara; dan
3. mengoptimalkan jejaring-jejaring dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam dan luar negeri.

D. Tujuan

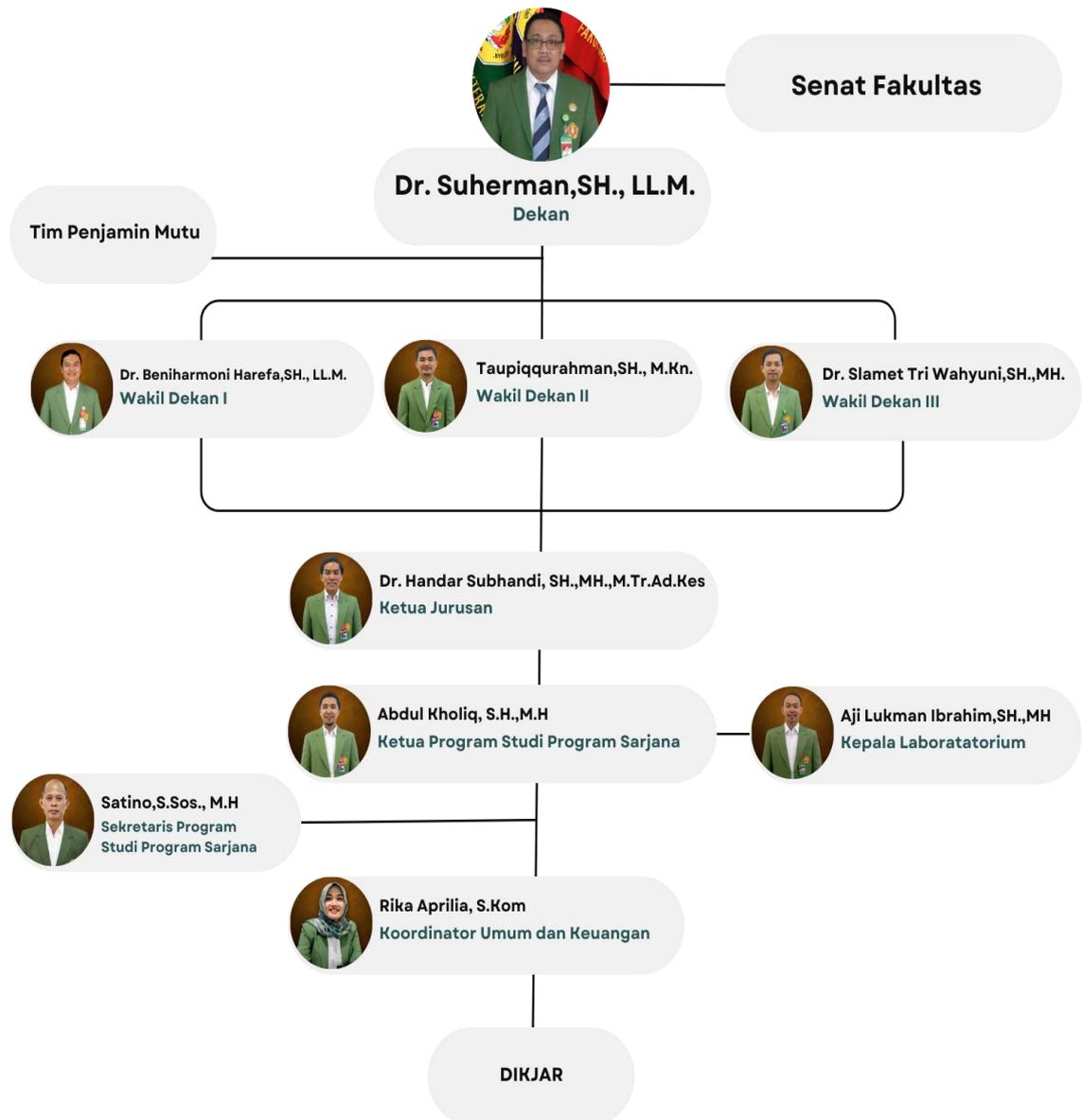
Tujuan Fakultas Hukum:

1. menghasilkan lulusan yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara.
2. menghasilkan lulusan yang yang mampu menerapkan ilmu hukum di legal industry, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah.
3. membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

Tujuan Program Studi:

1. menghasilkan sarjana hukum yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara;
2. menghasilkan sarjana hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum di *legal industry*, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah;
3. membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

E. Struktur Organisasi



Secara singkat struktur organisasi fakultas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Senat Fakultas

Senat Fakultas Hukum adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas. Keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Fakultas, para Guru Besar, dan Perwakilan Dosen. Fungsi utama Senat Fakultas adalah menetapkan kebijakan fakultas dan mengontrol pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas, sehingga kebijakan dan proses penyelenggaraan fakultas dapat terkontrol dan terkendali secara objektif dan transparan.

2. Pimpinan Fakultas

Pimpinan Fakultas Hukum bersifat kolektif, yang terdiri dari Dekan dan 3 (tiga) Wakil Dekan (Wadek). Dekan adalah pemimpin tertinggi sedangkan para Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di bawah Dekan. Tugas dari masing-masing pimpinan adalah :

- a. Dekan : Dr. Suherman, S.H., L.L.M
Tugas : memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum.
- b. Wakil Dekan I : Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M
Tugas : membantu Dekan di bidang akademik di Fakultas Hukum
- c. Wakil Dekan II : Taupiqqurahman, S.H., M.Kn
Tugas : membantu Dekan di bidang administrasi umum dan keuangan dalam rangka memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum di Fakultas Hukum
- d. Wakil Dekan III : Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H
Tugas : membantu Dekan di bidang kerja sama dan kemahasiswaan di Fakultas Hukum

3. Unsur Pelaksana Akademik

a. Ketua Program Studi: Abdul Kholiq, S.H. ,M.H

bertugas dalam menyusun rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

b. Sekretaris Program Studi: Satino, S.Sos.,S.H., M.H.

membantu ketua program studi dalam menyusun rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

c. Kepala Laboratorium: Aji Lukman Ibrahim,S.H.,M.H

bertugas mengkoordinasikan pendidikan hukum klinis dan dokumentasi bahan hukum di Laboratorium Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

4. Unsur Pelayanan

Kepala Subbag Umum dan Keuangan: Rika Aprilina, S.Kom

bertugas membantu kegiatan administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan pelaksana akademik yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh staf.

F. Rumpun Dosen

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa “dosen berkedudukan di Perguruan Tinggi adalah seorang yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk meningkatkan mutu Pendidikan nasional”. Saat ini jumlah dosen tetap Fakultas Hukum UPNVJ sebanyak 53 dosen dengan kualifikasi S3 sebanyak 22 dosen, kualifikasi S2 sebanyak 31 dosen, dengan kualifikasi jabatan akademik terdiri dari Guru Besar 2 dosen, 4 dosen Lektor Kepala,

40 dosen Lektor dan 7 dosen Asisten Ahli. Rasio dosen terhadap mahasiswa FH UPN “Veteran” Jakarta adalah 1:33. Sementara kinerja Dosen FH UPN “Veteran” Jakarta diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 76 tahun 2019 tentang monitoring dan evaluasi kinerja dosen UPN Veteran Jakarta yang mengatur kewajiban pemenuhan Tridharma dosen berdasarkan jabatan akademiknya.

Tabel: (1) Dosen Program Studi Hukum UPN “Veteran” Jakarta

NO	NAMA DOSEN	NIDN	KEPAKARAN	JABATAN FUNGSIONAL
1.	Bambang Waluyo	0312075804	Hukum Pidana	Guru Besar
2.	Wicipto Setiadi	0311095701	Hukum Tata Negara	Guru Besar
3.	Taufiqurahman Syahuri	0002056002	Hukum Tata Negara	Lektor Kepala
4.	Beniharmoni Harefa	0022098702	Hukum Pidana	Lektor
5.	Supardi	8890923420	Hukum Pidana	Lektor Kepala
6.	Subakdi	0325066301	MKWK	Lektor Kepala
7.	Dwi Desi Yayi Tarina	0001126211	Hukum Bisnis	Lektor Kepala
8.	Sulastri	0325067205	Hukum Perdata	Lektor
9.	Diani Sadiawati	0330016202	Hukum Internasional	Lektor
10.	Satino	0004126306	Hukum Bisnis	Lektor
11.	Mulyadi	0005116308	Hukum Pidana	Lektor
12.	Wardani Rizkianti	0027088702	Hukum Perdata	Lektor
13.	Khoirur Rizal Lutfi	0012108801	Hukum Internasional	Lektor
14.	Atik Winanti	000806608	Hukum Perdata	Lektor
15.	Suherman	0302067004	Hukum Bisnis	Lektor Kepala
16.	Handoyo Prasetyo	0019126303	Hukum Pidana	Lektor Kepala
17.	Imam Haryanto	0306126204	Hukum Bisnis	Lektor
18.	Iwan Erar Joesoef	0304036203	Hukum Bisnis	Lektor Kepala
19.	Heru Suyanto	0326106203	Hukum Bisnis	Lektor
20.	Heru Sugiyono	0015017607	Hukum Bisnis	Lektor Kepala
21.	Andrianto Adhi Nugroho	0330018002	Hukum Bisnis	Lektor
22.	Yuliana Yuli Wahyuningsih	0308076501	Hukum Pidana	Lektor

NO	NAMA DOSEN	NIDN	KEPAKARAN	JABATAN FUNGSIONAL
23.	Kayus Kayowuan Loweleba	0027017209	Hukum Pidana	Lektor
24.	Sylvana Murni Deborah Hutabarat	0005128402	Hukum Bisnis	Lektor
25.	Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe	0006108701	Hukum Perdata	Lektor
26.	Surahmad	0025097011	Hukum Perdata	Lektor
27.	Muhammad Helmi Fakhrozi	0019108906	Hukum Tata Negara	Lektor
28.	Dwi Aryanti Ramadhani	0326107201	Hukum Perdata	Lektor
29.	Muthia Sakti	0031129401	Hukum Bisnis	Lektor
30.	Dinda Dinanti	0007059301	Hukum Pidana	Asisten Ahli
31.	Slamet Tri Wahyudi	0027018603	Hukum Pidana	Lektor
32.	Suprima	0026069005	MKWK	Lektor
33.	Taupiqqurrahman	0002018708	Hukum Perdata	Lektor
34.	Rianda Dirkareszha	0021129302	Hukum Bisnis	Lektor
35.	Aji Lukman Ibrahim	0008079203	Hukum Pidana	Lektor
36.	Ali Imran Nasution	0011039007	Hukum Tata Negara	Lektor
37.	Rosalia Dika Agustanti	0025089401	Hukum Pidana	Lektor
38.	Citraresmi Widoretno Putri	0010018905	Hukum Tata Negara	Lektor
39.	Dian Khoreanita Pratiwi	0326069101	Hukum Internasional	Lektor
40.	Syamsul Hadi	0030089203	Hukum Tata Negara	Lektor
41.	Aurora Jillena Meliala	0009029109	Hukum Internasional	Lektor
42.	Davilla Prawidya Azaria	0030089203	Hukum Internasional	Asisten Ahli
43.	Handar Subhandi Bakhtiar	0028049301	Hukum Pidana	Lektor
44.	Ahmad Ahsin Thohari	0004087308	Hukum Tata Negara	Lektor
45.	Darmawan Sutawijaya	-	MKWK	Lektor
46.	Ridha Wahyuni	0018058204	Hukum Bisnis	Asisten Ahli

NO	NAMA DOSEN	NIDN	KEPAKARAN	JABATAN FUNGSIONAL
47.	Abdul Kholiq	0413109101	Hukum Pidana	Lektor
48.	Hilda Novyana	0014038704	Hukum Pidana	Asisten Ahli
49.	M. Rizki Yudha Perwira	0023039310	Hukum Internasional	Asisten Ahli
50.	Anni Alvionita Simanjuntak	0019079204	MKWK	Asisten Ahli
51.	Kaharudin	8918370023	Hukum Tata Negara	Lektor
52.	Mas Pungky Wijaya	8950350022	Hukum Administrasi Negara	Lektor
53.	Irwan Triadi	8841840017	Hukum Tata Negara	Lektor
54.	Yanto	8229001019	Hukum Perdata	Lektor
55.	Suwarsit	-	Hukum Bisnis	Tenaga Pengajar
56.	Arief Muliawan	-	Hukum Pidana	Tenaga Pengajar

G. Lembaga Penunjang

Penunjang adalah unsur yang ikut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Hukum di bawah koordinasi pimpinan Fakultas yaitu:

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UPNVJ

1. Ketua : Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H
2. Wakil Ketua : Heru Suyanto, SH., MH.
3. Sekretaris : Aji Lukman Ibrahim, S.H, M.H

H. Sarana dan Prasarana

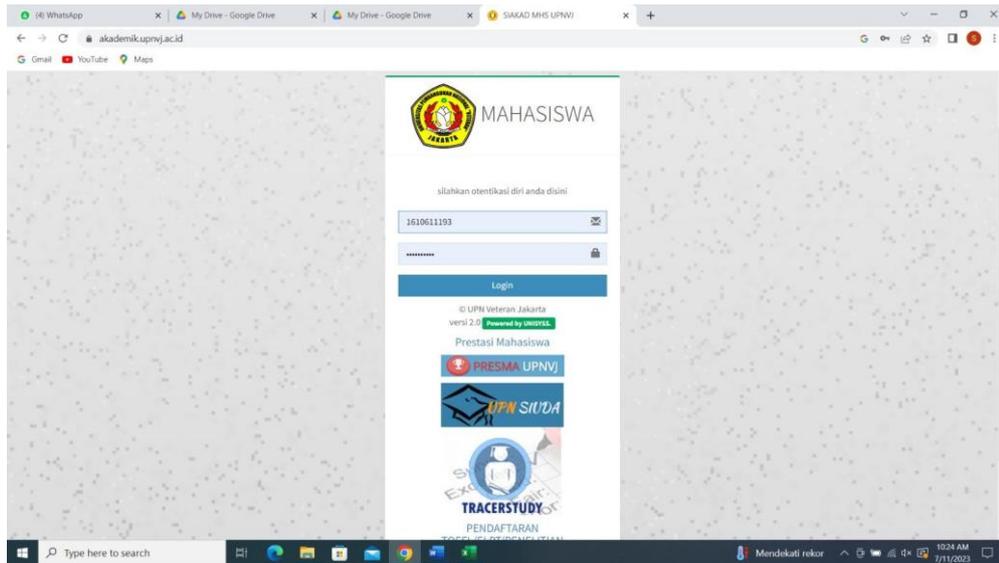
1. Laboratorium Peradilan Semu/*Moot Court* : 2, digunakan untuk:
 - a. Praktek Peradilan Perdata
 - b. Praktek Peradilan Pidana
 - c. Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara
 - d. Praktek Hukum Acara Peradilan Agama
2. Laboratorium Komputer, digunakan untuk :

- a. Praktek membuat dokumen-dokumen persidangan Perdata
- b. Praktek membuat dokumen-dokumen persidangan Pidana
- c. Praktek perancangan kontrak/Contract Drafting
- d. Praktek perancangan perundang-undangan
3. Ruang Baca (perpustakaan) Fakultas Hukum : 1
4. Ruang Podcast : 1
5. Ruang Rapat : 1
6. Ruang Kelas
 - a. Ruang Smart Class : 2
 - b. Ruang Kelas : 10
7. Ruang Ujian : 1
8. Ruang Dosen
 - a. Ruang Dosen Bagian Hukum Internasional : 1
 - b. Ruang Dosen Bagian Hukum Perdata : 1
 - c. Ruang Dosen Bagian Hukum Bisnis : 1
 - d. Ruang Dosen Bagian Hukum Pidana : 1
 - e. Ruang Dosen Bagian Hukum Tata Negara : 1
 - f. Ruang Dosen Bagian MKWU : 1
9. Ruang LKBH FH UPNVJ : 1
10. Ruang Ornawa dan UKM : 4

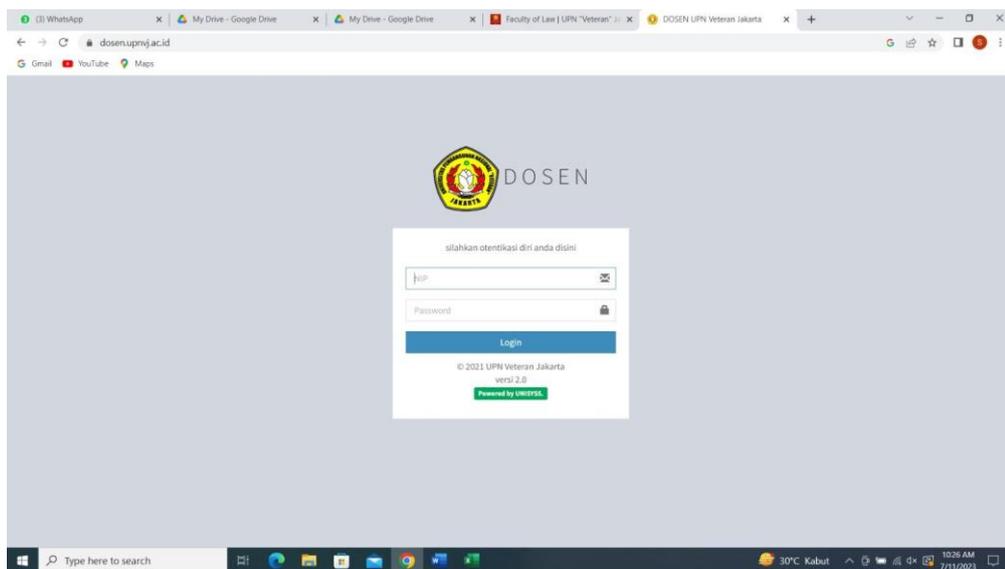
I. Sistem Layanan Informasi Digital

Fakultas Hukum UPNVJ telah memiliki layanan informasi yang berbasis digital dalam menunjang kegiatan akademik serta layanan kepada dosen, pegawai dan mahasiswa antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) merupakan system yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik yang dapat diakses melalui : <https://akademik.upnvj.ac.id/>



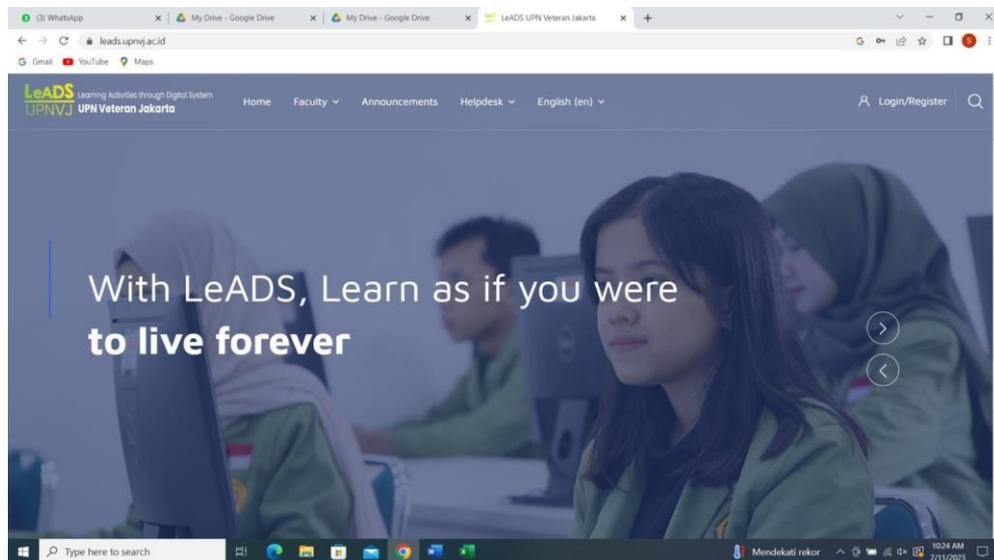
2. Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang dirancang untuk keperluan dosen dan tenaga kependidikan yang dapat diakses melalui : <https://sim.upnvj.ac.id/>



3. Dokumen Akademik yang dapat dilihat dan diunduh melalui Web Fakultas Hukum melalui Website Fakultas Hukum UPNVJ <https://hukum.upnvj.ac.id/e-dokumen-mahasiswa/>

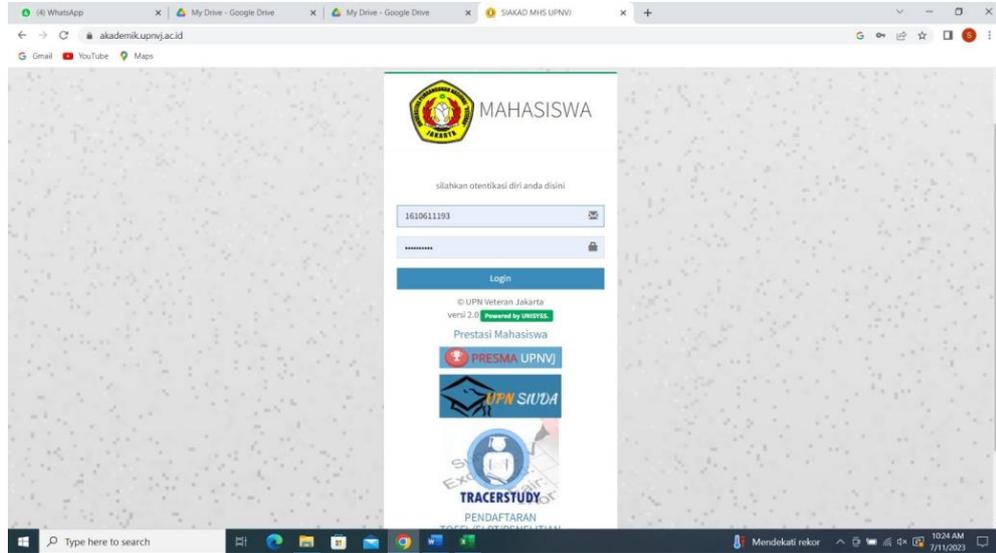


4. Sistem Pembelajaran berbasis LeADS merupakan suatu sitem yang dirancang untuk keperluan proses pembelajaran yang dapat diakses melalui : <https://leads.upnvj.ac.id/>



5. Tracer Study merupakan suatu system yang dirancang untuk pelacakan lulusan Fakultas Hukum UPNVJ guna mengetahui informas-informasi bidang kerja lulusan, yang dapat diakses

melalui: <https://tracer.upnvj.ac.id/> dan <https://hukum.upnvj.ac.id/tracer-study/>



6. Sistem Layanan Informasi Perpustakaan

Fakultas Hukum UPNVJ telah memiliki ruang baca berada di lantai 4 gedung Fakultas Hukum yang terintegrasi dengan layanan informasi Perpustakaan Universitas yang dapat diakses melalui <https://perpustakaan.upnvj.ac.id/> .



BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

A. Program Studi dan Kurikulum

1. Program Studi

Program Studi Hukum, Program Sarjana memiliki capaian pembelajaran yang meliputi aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus dan Keterampilan Umum.

a. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- b. Penguasaan pengetahuan
- 1) Mampu menginternalisasikan (*internalizing*) moral, etika dan nilai bela negara dalam menjalankan profesi dan kehidupan sehari-hari untuk pembangunan masyarakat Indonesia;
 - 2) Mampu menganalisis (*analyse*) teori hukum bidang hukum tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integratif dengan keindonesiaan dan Kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner;
 - 3) Kemampuan menerapkan (*applied*) metode dan logika berpikir dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menyusun legislative drafting, legal opinion, legal audit, legal contract, legal drafting, putusan dan eksaminasi serta dokumen hukum lainnya sebagai solusi atas perkara hukum yang ada dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesi:
- c. Keterampilan Khusus
- 1) Mampu melakukan peran *intermediary* melalui keterlibatan di dalam organisasi-organisasi dan profesi tertentu secara mandiri dan proporsional, dalam rangka penguatan demokrasi dan masyarakat;
 - 2) Mampu melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum sesuai dengan kaidah ilmiah, dan dapat menunjukkan hasil melalui publikasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau pengembangan ilmu hukum;
 - 3) Mampu memecahkan masalah-masalah hukum dan masyarakat akibat dinamika baik yang terjadi tingkat lokal maupun global;
 - 4) Mampu melakukan kerja-kerja nyata pemberdayaan dan pendampingan atas hak-hak warga masyarakat melalui

keterlibatan di organisasi-organisasi masyarakat sipil/ non pemerintah secara partisipatif dan berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun global;

- 5) Mampu mengimplementasikan kebijakan dan menjalankan tata kelola hukum serta pemerintahan di dalam lembaga-lembaga hukum tertentu secara inovatif, profesional, berintegritas, demokratis, transparan, dan akuntabel serta dengan memanfaatkan IPTEKS;
- 6) Mampu menerapkan pengetahuan dan analisa hukum dalam konteks keorganisasian dan industri.

d. Keterampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

2. Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dikembangkan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT-DIKTI) yang disebut dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kurikulum Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta setelah dirumuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk beban SKS minimal yang harus ditempuh berjumlah 148 SKS dengan komposisi Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Wajib Peminatan dan Mata Kuliah Pilihan lain untuk kemudian dijabarkan ke dalam bentuk sebaran mata kuliah sebagai berikut:

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan	
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8			
Mata Kuliah Wajib Universitas																		
1	MKW124104	Pendidikan Bela Negara	2					2									W	
2	MKW124102	Pendidikan Pancasila	2					2									W	
3	MKW124101	Pendidikan Agama	2					2									W	
4	MKW124606	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika	2										2				W	
5	MKW124607	Pendidikan Kewarganegaraan	2										2				W	
6	MKW124603	Bahasa Indonesia	2										2				W	
7	MKW124605	Kepemimpinan	2										2				W	
Mata Kuliah Wajib Fakultas/Program Studi																		
8	HKM124101	Pengantar Ilmu Hukum	3					3									W	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
9	HKM124102	Pengantar Hukum Indonesia	3					3										W	
10	HKM124103	Ilmu Negara	3					3										W	
11	HKM124104	Bahasa Inggris	2					2										W	
12	HKM124105	Sosiologi dan Antropologi Hukum	3					3										W	
13	HKM124201	Hukum Tata Negara	3						3									W	
14	HKM124202	Hukum Administrasi Negara	3						3									W	
15	HKM124203	Hukum Perdata	3						3									W	
16	HKM124204	Hukum Pidana	3						3									W	
17	HKM124205	Hukum Islam	2						2									W	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
18	HKM124206	Hukum Adat	2						2									W	
19	HKM124207	Hukum Internasional	2						2									W	
20	HKM124208	Hukum dan HAM	2						2									W	
21	HKM124301	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2							2								W	
22	HKM124302	Hukum Acara Perdata	3							3								W	
23	HKM124303	Hukum Acara Pidana	3							3								W	
24	HKM124304	Hukum Perikatan	2							2								W	
25	HKM124305	Hukum Agraria	3							3								W	
26	HKM124306	Tindak Pidana	2							2								W	
27	HKM124307	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan	3							3								W	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
28	HKM124308	Hukum Dagang	2							2								W	
29	HKM124401	Hukum Acara Peradilan Agama	2									2						W	
30	HKM124402	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2									2						W	
31	HKM124403	Praktek Peradilan Pidana			2							2						W	
32	HKM124404	Praktek Peradilan Perdata			2							2						W	
33	HKM124405	Praktek Peradilan TUN			2							2						W	
34	HKM124406	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	2		1							3						W	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
35	HKM124407	Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Sertifikasi Mediasi)	2		1						3							W	
36	HKM124601	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2											2				W	
37	HKM124602	Perancangan Kontrak (Sertifikasi Kontrak Drafting)			2									2				W	
38	HKM124603	Penalaran dan Argumentasi hukum	2											2				W	
39	HKM124701	Hukum Teknologi Informasi	2													2		W	
40	HKM124702	Hukum Lingkungan dan Climate Change	2													2		W	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan	
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8			
41	HKM124703	Filsafat Hukum	2												2		W	
42	HKM124704	Hukum Ketenagakerjaan	2												2		W	
43	HKM124705	Hukum Perdagangan Internasional	2												2		W	
44	HKM124706	Proposal TA		2											2		W	
45	HKM124801	Tugas Akhir (Skripsi, Jurnal, Memorandum Hukum)		4												4	W	
Mata Kuliah Wajib Konsentrasi/Peminatan																		
MK Konsentrasi Hukum Perdata																	P	
46	HKM124408	Hukum Waris Perdata	2									2					P	
47	HKM124409	Kapita selekta hukum perdata	2									2					P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
48	HKM124604	Hukum Perdata Internasional	2												2			P	
49	HKM124605	Hukum Orang dan Keluarga Perdata	2												2			P	
50	HKM124707	Hukum Benda dan Jaminan	2													2		P	
51	HKM124708	Perbandingan Hukum Perdata	2													2		P	
MK Konsentrasi Hukum Pidana																			
52	HKM124410	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana	2									2						P	
53	HKM124411	Hukum Penitensier	2									2						P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
54	HKM124606	Perbandingan Hukum Pidana	2												2			P	
55	HKM124607	Kriminologi	2												2			P	
56	HKM124709	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2													2		P	
57	HKM124710	Hukum Pidana Internasional	2													2		P	
MK Konsentrasi Hukum Bisnis																			
58	HKM124412	Legal due delligence	2									2						P	
59	HKM124413	Hukum Kepailitan	2									2						P	
60	HKM124608	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional	2												2			P	
61	HKM124609	Hukum Surat Berharga	2												2			P	
62	HKM124711	HK Investasi dan Pasar modal	2													2		P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan	
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8			
63	HKM124712	Hukum Perusahaan	2												2		P	
	MK Konsentrasi Hukum Tata Negara/HAN																	
64	HKM124414	Hukum Kelembagaan Negara	2									2					P	
65	HKM124415	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2									2					P	
66	HKM124610	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2											2			P	
67	HKM124611	Hukum Tata Negara Darurat	2											2			P	
68	HKM124713	Hukum pemerintahan daerah	2												2		P	
69	HKM124714	Hukum Pemilu	2												2		P	
	MK Konsentrasi Hukum Internasional																	
70	HKM124416	Hukum Perjanjian Internasional	2									2					P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
71	HKM124417	Hukum Laut	2									2						P	
72	HKM124612	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2											2				P	
73	HKM124613	Hukum Udara dan Angkasa	2											2				P	
74	HKM124715	Hukum Humaniter dan Kepengungsian	2											2	2			P	
75	HKM124716	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2												2			P	
MK Pembelajaran Luar Program Studi (PLPS)																			
76		Transnasionalisme dalam Politik Dunia (FISIP)	3										2					P	
77		Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial (FISIP)	3										2					P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan			
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8					
78		Data Science dan Analisa Politik (FISIP)	3											3					P	
79		Keamanan Siber (FISIP)	3											3					P	
80		Sistem Informasi Manajemen (FIK)	3											3					P	
81		Forensik Digital/Digital Forensic (FIK)	3											3					P	
82		PLPT UNNES	10											10					P	
83		PLPT UNTIRTA	10											10						
Mata Kuliah Pilihan Bebas																				
84	HKM124501	Perlindungan Konsumen	2													2			P	
85	HKM124502	Hukum Perbankan	2													2			P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan	
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8			
86	HKM124503	Hak Kekayaan Intelektual	2												2		P	
87	HKM124504	Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	2												2		P	
88	HKM124717	Hukum Pajak	2												2		P	
89	HKM124718	Hukum pengadaan barang dan jasa	2												2		P	
90	HKM124719	Hukum Partai Politik	2												2		P	
91	HKM124720	Perbandingan HTN	2												2		P	
92	HKM124721	Hukum Organisasi Internasional	2												2		P	
93	HKM124722	Hukum Forensik dan Medikolegal	2											2			P	
94	HKM124419	Hukum Militer	2											2			P	
95	HKM124420	Hukum Pembangunan Berkelanjutan	2											2			P	

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
96	HKM124421	Hukum dan Kecerdasan Buatan	2											2				P	
97	HKM124422	Legal opinion	2											2				P	
98	HKM124619	Legal audit	2											2				P	
99	HKM124614	Hukum Asuransi	2											2				P	
100	HKM124615	Viktimologi	2											2				P	
101	HKM124616	Hukum dan financial technology	2											2				P	
102	HKM124617	Hukum Transportasi dan Pengangkutan	2											2				P	
103	HKM124618	Hukum Pers	2											2				P	
104	HKM124620	Hukum perjanjian kredit	2											2				P	
Mata Kuliah/bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM																			
105	KMO124505	Magang					20							20				MBKM	(Kode MK yang Setara)

No	Kode MK	Nama MK/Prog. MBKM	Bentuk Pembelajaran (SKS)*					Semester dan SKS								W/P/ MBKM**	Prasyarat dan Pengakuan		
			K/T	S	P	L	MB- KM	1	2	3	4	5	6	7	8				
106	KMO124502	Pertukaran Mahasiswa Merdeka					20							20				MBKM	
107	KMO124504	Asisten Mengajar					20							20				MBKM	
108	KMO124506	Penelitian/Riset					20							20				MBKM	
109	KMO124510	KKN Tematik					20							20				MBKM	
110	KMO124509	Studi Independen					20							20				MBKM	
111	KMO124508	Kegiatan Kewirausahaan					20							20				MBKM	
112	KMO124507	Proyek Kemanusiaan					20							20				MBKM	
113	KMO124501	IISMA					20							20				MBKM	
Jumlah								20	20	20	20	20	20	22	20	4			146

3. Distribusi Mata Kuliah Per Semester

Semester 1			
No	KODE MATA KULIAH	Mata Kuliah	SKS
1	MKW124102	Pendidikan Bela Negara	2
2	MKW124101	Pendidikan Pancasila	2
3	HKM124101	Pendidikan Agama	2
4	HKM124102	Pengantar Ilmu Hukum	3
5	HKM124103	Pengantar Hukum Indonesia	3
6	HKM124104	Ilmu Negara	3
7	HKM124105	Bahasa Inggris	2
8	MKW124104	Sosiologi dan Antropologi Hukum	3
Total SKS			20
Semester 2			
1	HKM124201	Hukum Tata Negara	3
2	HKM124202	Hukum Administrasi Negara	3
3	HKM124203	Hukum Perdata	3
4	HKM124204	Hukum Pidana	3
5	HKM124205	Hukum Islam	2
6	HKM124206	Hukum Adat	2
7	HKM124207	Hukum Internasional	2
8	HKM124208	Hukum dan HAM	2
Total SKS			20
Semester 3			
1	HKM124301	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2
2	HKM124302	Hukum Acara Perdata	3
3	HKM124303	Hukum Acara Pidana	3
4	HKM124304	Hukum Perikatan	2
5	HKM124305	Hukum Agraria	3
6	HKM124306	Tindak Pidana	2

7	HKM124307	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan	3
8	HKM124308	Hukum Dagang	2
Total SKS			20
Semester 4			
1	HKM124401	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	HKM124402	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
3	HKM124403	Praktek Peradilan Pidana	2
4	HKM124404	Praktek Peradilan Perdata	2
5	HKM124405	Praktek Peradilan TUN	2
6	HKM124406	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	3
7	HKM124407	Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Sertifikasi Mediasi)	3
MK Konsentrasi Hukum Perdata			
8	HKM124408	Hukum Waris Perdata	2
9	HKM124409	Kapita selekta hukum perdata	2
MK Konsentrasi Hukum Pidana			
10	HKM124410	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana	2
11	HKM124411	Hukum Penitensier	2
MK Konsentrasi Hukum Bisnis			
12	HKM124412	Legal Due Delligence	2
13	HKM124413	Hukum Kepailitan	2
MK Konsentrasi Hukum Tata Negara/HAN			
14	HKM124414	Hukum Kelembagaan Negara	2
15	HKM124415	Hukum Pengawasan Pemerintahan	2
MK Konsentrasi Hukum Internasional			
16	HKM124416	Hukum Perjanjian Internasional	2
17	HKM124417	Hukum Laut	2
MK PILIHAN BEBAS			
18	HKM124418	Tindak Pidana Khusus	2
19	HKM124419	Hukum Militer	2
20	HKM124420	Hukum Pembangunan Berkelanjutan	2

21	HKM124421	Hukum dan Kecerdasan Buatan	2
22	HKM124422	Legal opinion	2
Total SKS			20
Semester 5			
Program MBKM			
1	KMO124505	Magang	20
2	KMO124502	Pertukaran Mahasiswa Merdeka	20
3	KMO124504	Kampus Mengajar	20
4	KMO124506	Riset	20
5	KMO124510	KKN Tematik	20
6	KMO124509	Studi Independen	20
7	KMO124508	Kegiatan Kewirausahaan	20
8	KMO124507	Proyek Kemanusiaan	20
9	KMO124501	IISMA	20
Program PLPS/PLTP			
MK PILIHAN BEBAS			
16	HKM124501	Perlindungan Konsumen	2
17	HKM124502	Hukum Perbankan	2
18	HKM124503	Hak Kekayaan Intelektual	2
19	HKM124504	Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	2
Total SKS			20

Semester 6			
1	MKW124606	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika	2
2	MKW124607	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	MKW124603	Bahasa Indonesia	2
4	MKW124605	Kepemimpinan	2
5	HKM124601	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
6	HKM124602	Perancangan Kontrak	2
7	HKM124603	Penalaran dan Argumentasi hukum	2
MK Konsentrasi Hukum Perdata			
8	HKM124604	Hukum Perdata Internasional	2

9	HKM124605	Hukum Orang dan Keluarga Perdata	2
MK Konsentrasi Hukum Pidana			
10	HKM124606	Perbandingan Hukum Pidana	2
11	HKM124607	Kriminologi	2
MK Konsentrasi Hukum Bisnis			
12	HKM124608	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional	2
13	HKM124609	Hukum Surat Berharga	2
MK Konsentrasi Hukum Tata Negara/HAN			
14	HKM124610	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian	2
15	HKM124611	Hukum Tata Negara Darurat	2
MK Konsentrasi Hukum Internasional			
16	HKM124612	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	2
17	HKM124613	Hukum Udara dan Angkasa	2
MK Pilihan Bebas			
18	HKM124614	Legal audit	2
19	HKM124615	Hukum Asuransi	2
20	HKM124616	Viktimologi	2
21	HKM124617	Hukum dan financial technology	2
22	HKM124618	Hukum Transportasi dan Pengangkutan	2
23	HKM124619	Hukum Pers	2
24	HKM124620	Hukum perjanjian kredit	2
Total SKS			22
Semester 7			
1	HKM124701	Hukum Teknologi Informasi	2
2	HKM124702	Hukum Lingkungan dan Climate Change	2
3	HKM124703	Filsafat Hukum	2
4	HKM124704	Hukum Ketenagakerjaan	2
5	HKM124705	Hukum Perdagangan Internasional	2
6	HKM124706	Proposal TA	2
MK Konsentrasi Hukum Perdata			
7	HKM124707	Hukum Benda dan Jaminan	2

8	HKM124708	Perbandingan Hukum Perdata	2
MK Konsentrasi Hukum Pidana			
9	HKM124709	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan	2
10	HKM124710	Hukum Pidana Internasional	2
MK Konsentrasi Hukum Bisnis			
11	HKM124711	HK Investasi dan Pasar modal	2
12	HKM124712	Hukum Perusahaan	2
MK Konsentrasi Hukum Tata Negara/HAN			
13	HKM124713	Hukum pemerintahan daerah	2
14	HKM124714	Hukum Pemilu	2
MK Konsentrasi Hukum Internasional			
15	HKM124715	Hukum Humaniter dan Kepengungsian	2
16	HKM124716	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2
MK Pilihan Bebas			
17	HKM124717	Hukum Pajak	2
18	HKM124718	Hukum pengadaan barang dan jasa	2
19	HKM124719	Hukum Partai Politik	2
20	HKM124720	Perbandingan HTN	2
21	HKM124721	Hukum Organisasi Internasional	2
22	HKM124722	Hukum Forensik dan Medikolegal	2
23	HKM124723	Hukum dan Kewirausahaan	2
Total SKS			20
Semester 8			
1	HKM124801	Tugas Akhir (Skripsi, Jurnal, Memorandum Hukum)	4
Total SKS			4

DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN BEBAS

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
MK Pilihan Bebas Disediakan Semester Ganjil			
1	HKM124501	Perlindungan Konsumen	2
2	HKM124502	Hukum Perbankan	2
3	HKM124503	Hak Kekayaan Intelektual	2

4	HKM124504	Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	2
5	HKM124717	Hukum Pajak	2
6	HKM124718	Hukum pengadaan barang dan jasa	2
7	HKM124719	Hukum Partai Politik	2
8	HKM124720	Perbandingan HTN	2
9	HKM124721	Hukum Organisasi Internasional	2
10	HKM124722	Hukum Forensik dan Medikolegal	2
11	HKM124723	Hukum dan Kewirausahaan	2
MK Pilihan Bebas Disediakan Semester Genap			
1	HKM124418	Tindak Pidana Khusus	2
2	HKM124419	Hukum Militer	2
3	HKM124420	Hukum Pembangunan Berkelanjutan	2
4	HKM124421	Hukum dan Kecerdasan Buatan	2
5	HKM124422	Legal opinion	2
6	HKM124614	Legal audit	2
7	HKM124615	Hukum Asuransi	2
8	HKM124616	Viktimologi	2
9	HKM124617	Hukum dan financial technology	2
10	HKM124618	Hukum Transportasi dan Pengangkutan	2
11	HKM124619	Hukum Pers	2
12	HKM124620	Hukum perjanjian kredit	2

4. Konsentrasi peminatan atau Program Konsentrasi (PK) terdiri atas konsentrasi program peminatan:
- a. PK I Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara
 - b. PK II Hukum Pidana
 - c. PK III Hukum Perdata
 - d. PK IV Hukum Bisnis
 - e. PK V Hukum Internasional

5. Beban Studi ditetapkan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Beban studi minimal untuk memperoleh sarjana hukum adalah 146 SKS. IPK minimal kelulusan diperoleh 2,75 yang dapat ditempuh melalui masa studi minimal 8 semester dan maksimal 14 semester.
6. Mata kuliah terbagi atas kelompok mata kuliah MPK, MBB, MKK, MKB, MPB dan mata kuliah prasyarat. Rincian mata kuliah sebagai berikut:

Jenis Mata Kuliah	SKS
Mata kuliah wajib universitas	14
Mata kuliah wajib prodi	92
Mata kuliah wajib peminatan	12
Mata kuliah pilihan bebas	8
Mata Kuliah Luar PT/MBKM/PLPS	20
Total	146

Matakuliah pilihan merupakan matakuliah yang wajib diambil sebanyak 20 SKS. Mahasiswa dapat memilih matakuliah pilihan yang sudah ditetapkan, mengambil matakuliah lintas minat dan dapat memilih matakuliah pada program studi di lingkungan universitas.

7. Beban studi mahasiswa per semester berkisar antara 12-24 sks, yang ditentukan oleh IPS (Indeks Prestasi Semester) yang diperoleh mahasiswa setiap semester.

IPS	Jumlah SKS
> 3,00	Maksimal 24
2,50 - 2,99	Maksimal 21

2,00 – 2,49	Maksimal 18
1,50 – 1,99	Maksimal 15
< 1,50	Maksimal 12

B. Deskripsi Mata Kuliah Kompetensi

1. Pengantar Ilmu Hukum

Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum yang diberikan di awal semester, sebagai mata kuliah prasyarat dari semua mata kuliah di bidang ilmu hukum dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa fakultas hukum. Oleh sebab itu, PIH merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki dan dikuasai oleh para mahasiswa sebelum mendalami kuliah selanjutnya tentang hukum. Pada MK PIH juga bermaksud menanamkan kerangka hukum secara umum dan tidak terikat tempat dan waktu yang bersifat universal.

2. Pengantar Hukum Indonesia

Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah mata kuliah berobyek hukum, dengan menunjuk keadaan hukum negara tertentu (*Ius Constitutum*), yaitu hukum Indonesia. Mata kuliah ini mengenalkan tentang tata hukum Indonesia dan sejarah tata hukum Indonesia, sistem hukum civil law dan common law, Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Adm. Negara (HAN), Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Bisnis, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Internasional, , serta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.

3. Ilmu Negara

Mata kuliah Ilmu Negara memberikan pengetahuan dasar tentang negara, mata kuliah ilmu negara juga memberikan aspek keilmuan

terkait kualifikasi, hakikat tujuan dan fungsi negara, serta teori teori kekuasaan dan jaran kedaulatan dalam bernegara

4. Hukum Agraria

Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan dan pengelolaan agraria khususnya hak-hak penguasaan atas tanah agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia, konsepsi dan prinsip-prinsip hukum tanah, hak-hak penguasaan atas tanah, pengalihan hak-hak atas tanah, pendaftaran tanah, hak jaminan atas tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan landreform, serta implementasinya dalam segala perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut hak-hak atas tanah baik terkait subjek dan objeknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.

5. Hukum Islam

Mata kuliah ini mempelajari pengertian, ruang lingkup hukum Islam, terminologi dan kerangka dasar ajaran agama Islam, asas-asas hukum Islam, sumber hukum Islam, perkembangan hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia, dan kewenangan peradilan agama.

6. Hukum Perikatan

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang hubungan perdata yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang

menyangkut perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan perdata, yang diatur oleh hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Hukum Perikatan (buku III Perikatan), yang semuanya ini merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum konkrit dalam masyarakat

7. Hukum Internasional

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib fakultas yang membahas kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, dan antara negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Oleh karena tidak adanya mata kuliah pengantar hukum internasional maka mata kuliah hukum internasional ini juga berposisi sebagai mata kuliah pengantar. Ruang lingkup hukum internasional yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah subjek hukum internasional, sumber-sumber hukumnya, dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu beberapa cabang dari hukum internasional seperti: Hukum Laut Internasional, Hukum Humaniter, Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Penyelesaian Sengketa Internasional dan lain sebagainya akan dibahas.

8. Hukum Dagang

Mata kuliah ini membahas tentang regulasi, konsep dan implementasi dari hukum dagang secara umum, hukum perusahaan, badan usaha (badan hukum dan bukan badan hukum), surat berharga, lembaga pembiayaan, penanaman modal, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Asuransi, Hukum Persaingan Usaha dan penyelesaian sengketa hukum dagang. Metode yang digunakan adalah Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student center learning (pembelajaran

berpusat pada mahasiswa). Para mahasiswa didukung dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Ada empat kegiatan (metode) utama yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yaitu: Presentasi (penyajian) materi oleh dosen, presentasi oleh mahasiswa, diskusi kelas berbasis kelompok dan Penugasan. Metode penilaian dilakukan melalui Tes berbasis media elektronik (quiziz, kahoot, turnitin) Rubrik untuk Penilaian produk (resume, makalah), penilaian kinerja (presentasi dalam diskusi kelas, partisipasi perkuliahan) dan Penilaian sikap (perilaku selama mengikuti kuliah dan ketaatan terhadap aturan).

9. Hukum Telematika

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum Telematika atau Cyber Law. Bahwa generasi saat ini telah banyak menggunakan sarana digital dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan internet, aplikasi dalam internet, computer sampai pada perilaku jual beli melalui online sudah banyak dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dalam mata kuliah ini membahas mengenai teknologi, internet, UU ITE, E-Commerce, Domain Name dalam Haki sampai pada digital forensik sebagai pembuktian dalam hukum acara. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjadi ilmuwan yang memiliki keahlian dibidang ilmu hukum khususnya hukum telematika, berwawasan luas dan terbuka pengetahuannya mengenai kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, memiliki pemikiran holistic, tidak egois, kritis namun tidak akan lepas dari cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warganegara yang memiliki daya saing, disiplin serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehidupan serta berperan aktif dalam era industri 4.0.

10. Hukum Acara perdata

Hukum Acara Perdata adalah Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Mata kuliah ini akan membahas ruang lingkup hukum acara perdata, penyusunan surat-surat berdasarkan teori hukum perdata

11. Hukum Acara Pidana

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengertian Hukum Acara Pidana , hak, tugas dan kewenangan dalam Hukum Acara Pidana , maksud dan tujuan penyelidikan dan penyidikan, bentuk-bentuk upaya paksa, penuntutan, peradilan, eksekusi dan ganti rugi.

12. Hukum Acara Administrasi /TUN

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperangkat peraturan-peraturanyang memuat cara bagaimana seseorang atau subyek hukum harus bertindak terhadap Keputusan Tata Usaha Negara melalui upaya administratif atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta cara Pengadilan Tata Usaha Negara bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan Hukum Administrasi Negara (materiil)

13. Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang atau subyek hukum harus bertindak dalam beracara di Pengadilan Agama, serta cara Pengadilan Agama bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan sebagaimana diatur dalam undang-undang peradilan agama dan kompilasi hukum islam (materiil).

14. Hukum Lingkungan dan Perubahan Iklim

Mata kuliah ini merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan

15. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum bisnis bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mencakup Hak Cipta, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan TRIPS Agreement dan peraturan perundang-undangan HAKI, pendalaman materi tentang bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diskusi terkait irisan antar bidang Hak Kekayaan Intelektual, studi kasus dan praktek sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

16. Hukum Tata Negara Darurat

Mata kuliah Hukum Tata Negara Darurat menjelaskan penerapan hukum dalam keadaan yang tidak normal/abnormal. HTN Darurat bertujuan sebagai pranata dan memberikan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa

17. Hukum Pengawasan

Mata kuliah Hukum Pengawasan ini menguraikan dan menjelaskan tentang teori, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap pengawasan pemerintahan.

18. Tindak Pidana

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan Hukum Pidana. Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, sejarah perkembangan Tindak Pidana Korupsi; hubungan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Nasional; asas-asas Tindak Pidana Korupsi; karakteristik Tindak Pidana Korupsi, macam-macam kejahatan Internasional dan mencari penyelesaiannya

19. Hukum Benda dan Jaminan

Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum kebendaan, sistematika hukum benda, sumber dan perkembangan pengaturan hukum benda, eksistensi hukum kebendaan setelah berlakunya UUPA dan UUHT, sifat pengaturan hak benda dibandingkan dengan sifat pengaturan hukum perikatan, asas-asas hukum benda, macam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan KUH Perdata, macam kebendaan berdasarkan totalitas bendanya, macam kebendaan berdasarkan kepemilikannya, perbedaan hak kebendaan dengan hak perseroan, mengenai hak menguasai/ kedudukan berkuasa, hak milik, jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan dan hak kebendaan di atas benda milik orang seperti hak pakai (memungut) hasil dan hak pakai serta mendiami

20. Hukum Keluarga Islam (Hukum Perkawinan & Waris Islam)

Hukum Keluarga Islam adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi peserta didik mengenai teori

tentang materi Tinjauan Umum Hukum Islam, Pendahuluan dalam Pernikahan, Dasar-Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dan Tata Cara Perkawinan Serta Akta Perkawinan. Larangan Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Kawin Hamil, Poligami. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Pemeliharaan Anak & Asal Usul Anak, Putusnya Hubungan Perkawinan.

21. Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa memahami, menganalisis dan cakap untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen (HPK). Memahami latar belakang perlunya HPK serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Menganalisa klausul baku yang ada di masyarakat serta aspek-aspek didalamnya. Mengidentifikasi pengertian produk, product liability serta tanggung jawab produsen. Menjelaskan tugas dan tanggungjawab lembaga pemberdayaan konsumen serta menganalisis sengketa konsumen.

22. Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi peserta didik mengenai teori tentang materi Pengertian Dan Dasar Hukum Kepailitan, Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan, Pernyataan Kepailitan, Akibat Hukum Keputusan Kepailitan, Pengurusan Harta Pailit, Pencocokkan Tagihan-Tagihan, Berakhirnya Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perdamaian

23. Hukum Udara Dan Ruang Angkasa

Mata kuliah ini menjelaskan norma norma hukum udara dan ruang angkasa, serta dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum udara yang terdapat dalam hukum internasional (Chicago C. 1944 dan amandemen-amandemennya, dan Annexes) dan Hukum Nasional (UU No.1/2009) serta perundangan lainnya. Pemahaman hukum ruang angkasa (antariksa) yg terdapat dalam The Outer Space Treaty 1967, dan Konvensi-konvensi lainnya serta UU No 16 Tahun 2002).

24. Hukum Laut

Mata Kuliah yang membahas aspek-aspek hukum dari wilayah negara yang berupa laut. Mata kuliah ini mendiskusikan tentang berbagai zona maritim yang dikenal di dalam Hukum Laut Internasional, mulai dari Perairan Pedalaman (*Internal Waters*) sampai dengan Laut Lepas (High Seas). Selain pengaturan tentang zona-zona tersebut, hak-hak dan kewajiban negara-negara, terutama terkait dengan hak pelayaran dan hak kenelayanan pada berbagai zona maritim juga diberi porsi pembahasan yang memadai. Beberapa pokok penting di dalam Hukum Laut Internasional juga dibahas, yakni tentang konsep Negara Kepulauan, Pencemaran Laut dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional

25. Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika

Perkuliah Filsafat Ilmu dan Logika diberikan kepada mahasiswa dengan harapan mereka dapat mempelajari ilmu hukum lebih mendalam, setelah mereka menempuh dan lulus mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia. Selain dari itu diberikan mata kuliah Filsafat Hukum dimaksudkan sebagai rangkuman untuk mencegah bahwa si calon sarjana karena pendidikan spesialisasinya jangan sampai kehilangan pandangan atas lapangan Ilmu Hukum sebagai suatu keseluruhan. Diharapkan pula dapat dijadikan sebagai bekal mereka apabila

sudah terjun kemasyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pembinaan. Pendidikan Kewarganegaraan. Esensi materi perkuliahan ini antara lain meliputi peristilahan, pengertian, dan sejarah serta ruang Filsafat Hukum.

26. Hukum Tata Negara

Mata kuliah Hukum Tata Negara ini mempelajari istilah dan pengertian, pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 melalui pendekatan teoretis, historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis, pengertian ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara, ruang lingkup hukum tata negara, hakikat hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, teori konstitusi, perkembangan UUD 1945, konsepsi negara hukum dan demokrasi, sistem pemerintahan (sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945), lembaga-lembaga negara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, sistem pemilu di Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi

27. Hukum Administrasi Negara

Mata kuliah ini membahas tentang negara dalam dinamis yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan. Dalam HAN akan dibahas tentang ruang lingkup, hubungan HAN dengan ilmu kenegaraan lainnya, sumber hukum HAN, keputusan administrasi negara, tindakan administrasi negara, peraturan kebijakan, kedudukan hukum pejabat publik, dan penegakan hukum administrasi negara

28. Hukum Perdata

Capaian pembelajaran lulusan yang diberikan pada mata kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis buku I, II, III,IV, KUHD, Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Pokok Agraria

29. Hukum Pidana

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang hukum pidana materiil, perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, alasan penghapusan pidana, percobaan pidana, penyertaan, perbarengan perbuatan pidana dan pengulangan (residiv).

30. Hukum Adat

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap dasar, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam memahami Hukum Adat. Hukum Adat di Perguruan Tinggi adalah upaya dasar dan terencana dalam mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ilmu hukum dari sumber utamanya secara tekstual dan kontekstual. Upaya dimaksud dilakukan melalui kegiatan perkuliahan, bimbingan, latihan, dan pengalaman yang disampaikan secara dialogis, komprehensif, dan multiperspektif.

31. Hukum dan Masyarakat

Mata kuliah ini membahas tentang penggunaan teori-teori Hukum dan Masyarakat dan mendeskripsikan hubungan antara berbagai pranata sosial dengan hukum.

32. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mata kuliah ini mempelajari tentang pandangan dan anggapan terhadap hukum acara mahkamah konstitusi, istilah dan pengertian hukum acara mahkamah konstitusi, sejarah singkat konstitusi dan mahkamah konstitusi, hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara sengketa pemilihan umum, hukum acara sengketa pemilihan kepala daerah, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, hukum acara pembubaran partai

politik, hukum acara pemakzulan preaden dan wakil presiden, tafsir konstitusi, putusan-putusan yang kontroversial, penyusunan surat permohonan pengujian undang-undang

33. Hukum Ketenagakerjaan

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami arti dan sifat dari hukum ketenagakerjaan. Dimana hukum ketenagakerjaan mengatur beberapa system serta mekanisme dalam mengatur ketenagakerjaan baik dalam hal pengupahan, penempatan maupun perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun tenaga kerja asing.

34. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan ketentuan yang berkaitan dengan tujuan, Teori dan Perkembangan Sebuah penelitian. Penelitian dalam hukum harus menjelaskan mengenai peran dalam hukum itu sendiri dengan menggunakan peran logika serta model legal reasoning yang digunakan.

35. Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan

Setelah menyelesaikan matakuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dengan mengetahui system peraturan perundang-undangan, asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, landasan formal dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan serta mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan itu terbentuk.

36. Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang substansinya dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan memformulasi Hukum

dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya kebijakan penanggulangan suatu Tindakan.

37. Filsafat Hukum

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Untuk dapat menempuh mata kuliah ini, mahasiswa harus terlebih dahulu lulus dalam mata kuliah hukum perdata maupun pidana sebagai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah ini secara garis besar menyuguhkan materi tentang definisi dan factor penyebab timbulnya filsafat hukum landasan dan ruang lingkup serta objek filsafat hukum, Tujuan hukum dan filsafat hukum fungsi dan peranan serta tugas filsafat hukum, terbentuknya hukum dan bentuk-bentuk hukum, sumber-sumber dan asal mula filsafat filsafat hukum, filsafat hukum pada berbagai masa, beberapa aliran dalam filsafat hukum, dan beberapa permasalahan dalam filsafat hukum.

38. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami pengertian tentang tata cara dan proses persidangan di pengadilan, menyusun bentuk-bentuk surat terkait proses persidangan. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan atas suatu putusan, sehingga diharapkan dapat membantu menangani masalah hukum terkait sengketa keperdataan.

39. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan yang berkaitan dengan etika secara umum maupun secara khusus, termasuk kode etik beberapa profesi yang terkait dengan profesi hukum. Paham terhadap arti penting dan kedudukan etika profesi dalam pengantar etika, moralitas, dan integritas aparat hukum dan penegak hukum. Dengan memahami kode etik mahasiswa pada saat memasuki suatu profesi tertentu

mampu mengimplementasikan kode etik yang menjadi pedoman kerjanya, dalam rangka membangun Indonesia yang berkesesuaian dengan fondasi etika yang berakar pada Pancasila, sebagai jangkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

40. Perancangan Kontrak

Mata kuliah Perancangan Kontrak mencakup aspek aspek praktis dalam merancang kontrak yang meliputi istilah hukum kontrak, asas-asas hukum kontrak, pengaturan hukum kontrak, syarat sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, teori-teori tercapainya kesepakatan, kontrak baku, jenis-jenis kontrak, perjanjian nominaat dan innominaat, berakhirnya atau hapusnya kontrak, pembuatan kontrak, kerangka atau anatomi kontrak dan tahap-tahap dalam pembuatan kontrak tertulis.

41. Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum

Mata kuliah Penalaran dan Argumentasi Hukum ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa dalam menganalisa isu-isu hukum yang aktual sebab suatu penalaran tersebut dilakukan untuk mencapai kebenaran. Suatu kebenaran yang dicapai itu tentunya disesuaikan dengan tujuan hukum itu sendiri. Dengan terarahnya penalaran Mahasiswa dalam menganalisa isu-isu hukum yang terjadi dalam masyarakat, maka alur pikir Mahasiswa akan dapat mencapai kebenaran serta searah dengan tujuan hukum itu sendiri.

42. Praktik Peradilan

Praktek Peradilan adalah prosedur atau tata cara beracara di pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara dalam rangka menyelesaikan sengketa perdata, tata usaha negara dan pidana meliputi pembuatan dokumen hukum/berkas persidangan dan simulasi persidangan untuk menegakkan peraturan hukum materiil

43. Hukum Kelembagaan Negara

Hukum Kelembagaan Negara (HKN) sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan Hukum (MKKKH) memiliki posisi untuk mendukung pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenai teori - teoridan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara.

44. Hukum Pemerintahan Daerah

Mata Kuliah ini membahas mengenai sistem pemerintahan secara vertikal yaitu tentang pemerintahan daerah. Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai asas-asas pemerintahan daerah, bentuk negara, teori desentralisasi, desentralisasi di beberapa negara, sistem-sistem otonomi daerah, sejarah dan pengaturan desentralisasi di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, pembagian dan hubungan kewenangan pusat dan daerah, produk hukum daerah, pemilihan kepala daerah, dan pemerintahan desa

45. Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang substansinya dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan memformulasi dan mereformulasi kebijakan kriminal sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana, yang menjadi merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy) yang ditempuh dengan pendekatan yang integral,

yaitu ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Mata kuliah ini juga dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan formulasi dan mereformulasi sistem pembaruan hukum pidana sebagai upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana.

46. Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang lahir pada abad ke-19 bersama-sama dengan sosiologi, antropologi, dan psikologi yang merupakan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab timbulnya kejahatan dan keadaan yang pada umumnya turut memengaruhi timbulnya kejahatan serta mempelajari cara menanggulangi kejahatan. Dalam mata kuliah ini juga akan dipaparkan mengenai perkembangan kriminologi dari awal hingga kriminologi kontemporer.

47. Hukum Orang dan Keluarga

Mata kuliah hukum perorangan dan perkawinan merupakan mata kuliah wajib program kekhususan hukum perdata yang ruang lingkup kajiannya adalah hukum orang, hubungan keluarga, kedudukan anak dalam hukum keluarga, perwalian dan pengampuan, pencatatan peristiwa hukum, keadaan tidak hadir, hukum perkawinan, dan hukum perceraian.

48. Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi peserta didik atas masalah-masalah kewarisan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang mana masih berlaku pluralisme hukum, yaitu masih berlakunya hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata barat secara bersamaan termasuk hukum terkait pewarisan. Dalam mata kuliah hukum waris ini akan

dijelaskan ketiga hukum waris tersebut yaitu hukum waris berdasarkan Hukum Adat, Hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (KUHPPerdata) serta hukum waris dalam pelaksanaan undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mata kuliah mencakup tentang konsepsi pewarisan, siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak atas waris, bagaimana pelaksanaannya, perhitungannya dan pengurusannya, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami permasalahan hukum waris yang berlaku di Indonesia baik secara teori dan praktik.

49. Hukum Perusahaan

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang hubungan perdata yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut kegiatan usaha baik dalam bentuk badan usaha sebagai badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang diatur oleh hukum Perdata yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Undang-Undang Perseroan khususnya terkait Hukum Perusahaan, yang semuanya ini merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum konkrit dalam masyarakat khususnya tanggung jawab pelaksanaan usaha oleh pelaku usaha dan dampaknya terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan badan usaha.

50. Hukum Investasi dan Pasar Modal

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat memahami, menganalisis dan cakap untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Investasi. Melakukan kajian berdasarkan asas-asas investasi yang berlaku di Indonesia. Memahami dan menjelaskan mengenai Badan Penanaman Modal. Mengkaji

permasalahan investasi berdasarkan kasus terkini di Indonesia serta mengidentifikasi penerapan *good governance*.

51. Hukum Diplomatik dan Konsuler

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan Hukum Internasional. Mata Kuliah ini membahas tentang bentuk-bentuk hubungan diplomatik dan Fungsi-fungsi Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Pendirian Perwakilan Konsuler dan Fungsi-fungsi Perwakilan Konsuler, Fasilitas Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler.

52. Hukum Perjanjian Internasional

Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai mata kuliah yang mendalami keberadaan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, mengajarkan tentang dasar pengertian, tahapan pembuatan perjanjian internasional serta memahami pemberlakuan perjanjian internasional dalam hukum nasional.

53. Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional tentang ruang lingkup, prinsip-prinsip, teori, hambatan, kebijakan, dan sumber hukum perdagangan internasional, pada mata kuliah ini juga membahas mengenai peran WTO dalam perdagangan internasional serta pembuatan draft perjanjian internasional.

54. Hukum Teknologi Informasi

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan yang berkaitan dengan etika secara umum maupun secara khusus, termasuk kode etik beberapa profesi yang terkait dengan profesi hukum. Paham terhadap arti penting dan kedudukan etika profesi dalam pengantar etika, moralitas, dan

integritas aparat hukum dan penegak hukum. Dengan memahami kode etik mahasiswa pada saat memasuki suatu profesi tertentu mampu mengimplementasikan kode etik yang menjadi pedoman kerjanya, dalam rangka membangun Indonesia yang berkesesuaian dengan fondasi etika yang berakar pada Pancasila, sebagai jangkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

55. Hukum Pemilu

Mata kuliah Hukum Pemilu menjelaskan mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem pemilu di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai penyelenggara dan peserta Pemilu serta upaya penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia.

56. Hukum Pajak

Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan pajak di Indonesia, tujuan pemerintah mengenakan pajak kepada warga Negara serta apa landasan pemerintah dalam pengenaan pajak baik secara sosiologis, filosofis serta yuridis. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum pajak di Indonesia, prinsip-prinsip hukum pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pelaksanaan undang-undang pajak serta penyelesaian sengketa baik terkait subjek dan objek pajaknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum

berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.

57. Hukum Pidana Internasional

Mata kuliah ini merupakan perpaduan antara dua disiplin hukum, yaitu hukum internasional dan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, sebelum mengulas lebih lanjut pengertian “hukum pidana” dan “hukum internasional”. Pemahaman terhadap pengertian kedua disiplin hukum tersebut mempermudah kita menarik benang merah dari hakekat pengertian hukum pidana internasional.

58. Hukum Perdata Internasional

Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum perdata Internasional, berkaitan dengan domisili, kewarganegaraan, perkawinan campuran, pemeliharaan anak, hukum perjanjian internasional, hukum ekonomi internasional dan arbitrase internasional. Termasuk juga didalamnya mengenai ketertiban umum, pilihan hukum, penyelundupan hukum dan perbuatan melawan hukum.

59. Perbandingan Hukum Perdata

Mata kuliah ini mempelajari tentang pandangan dan anggapan terhadap perbandingan hukum, istilah dan pengertian perbandingan hukum perdata, sejarah singkat perbandingan hukum perdata, letak perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup di antara Ilmu Pengetahuan lainnya, macam-macam perbandingan hukum perdata adat, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, kebutuhan yang mendorong membandingkan hukum (kebutuhan teoritis dan kebutuhan praktis), sebab adanya perbedaan dan persamaan di bidang hukum, fungsi perbandingan hukum, manfaat perbandingan hukum, proses perbandingan hukum, obyek perbandingan hukum, dasar dan peoman pokok

dalam memproses perbandingan hukum, macam-macam metode perbandingan hukum, gagasan tentang keluarga hukum, sistem hukum di Dunia, sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, pengertian lembaga hukum perdata, macam lembaga hukum perdata, membandingkan lembaga hukum perdata, pengecualian sebagai subyek hukum, kecakapan dan kewenangan subyek hukum, domisili berdasarkan sistem hukum di Indonesia, tempat kedudukan badan hukum, perbandingan hukum perdata tentang perkawinan, perbandingan hukum perdata tentang adopsi, perbandingan hukum benda tentang benda, perbandingan hukum perdata tentang perjanjian, dan perbandingan hukum perdata tentang waris.

60. Perbandingan Hukum Pidana

Matakuliah ini pada dasarnya merupakan mata kuliah Wajib Program Kekhususan Perbandingan Hukum Pidana, mahasiswa diperkenalkan mengenai pengetahuan atau isu-isu yang paling mendasar (basic knowledge/basic issues) mengenai : pengertian Perbandingan Hukum Pidana, Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Hukum Pidana, perbandingan hukum pidana dan penjelasannya, sistem hukum dan perbandingan hukum pidana di beberapa negara, asas-asas hukum pidana di beberapa negara, jenis-jenis pidana di beberapa negara, pemberatan dan pengurangan pidana di beberapa negara, keluarga hukum di dunia. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan menjelaskan semua materi pembelajaran

61. Hukum Perlindungan Konsumen

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa memahami, menganalisis dan cakap untuk mendiskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen (HPK). Memahami latar belakang perlunya

HPK serta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Menganalisa klausul baku yang ada di masyarakat serta aspek-aspek didalamnya. Mengidentifikasi pengertian produk, product liability serta tanggungjawab produsen. Menjelaskan tugas dan tanggungjawab lembaga pemberdayaan konsumen serta menganalisa sengketa konsumen.

62. Hukum Anti Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat

Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum persaingan usaha, seperti latar belakang dan tujuan pemberlakuan hukum persaingan usaha, prinsip umum dalam hukum persaingan usaha, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, penegakan hukum persaingan usaha, serta kegiatan-kegiatan yang dikecualikan oleh hukum persaingan usaha.

63. Hukum Humaniter dan Kepengungsian

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menguraikan terminologi dan latar belakang lahirnya hukum humaniter internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Sumber-sumber hukum yang berlaku dalam hukum humaniter, jenis-jenis konflik bersenjata, prinsip-prinsip dan pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme penegakan hukum humaniter ketika terjadi pelanggaran dalam suatu konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

64. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Merupakan mata kuliah hukum internasional di bidang penyelesaian sengketa internasional dengan materi sajian meliputi: pendahuluan, prinsip - prinsip penyelesaian sengketa secara damai, penyelesaian sengketa internasional yang bersifat non litigasi,

penyelesaian sengketa internasional yang bersifat litigasi, penyelesaian sengketa internasional berdasarkan Bab VII Piagam PBB, penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan, penyelesaian sengketa di organisasi internasional.

65. Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Matakuliah ini mempelajari terkait perlindungan hukum terhadap anak, batasan umur anak, anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, system peradilan pidana anak, pembinaan anak. Keadilan Restoratif dan Diversi dalam penanganan perkara anak. Seluruhnya berdasarkan pada kepentingan terbaik anak (for the best interest of child)

66. Hukum Pidana Internasional

Mata kuliah Hukum Pidana Internasional adalah studi yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan internasional serta mekanisme penegakan hukum di tingkat global. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur tindak pidana yang memiliki dimensi internasional, termasuk kejahatan yang dianggap serius oleh komunitas internasional, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

67. Legal due diligence

Mata kuliah Legal Due Diligence berfokus pada pemahaman, teknik, dan praktik yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi hukum terhadap suatu perusahaan atau aset sebelum transaksi bisnis, seperti akuisisi, merger, atau investasi. Mata kuliah ini menjelaskan juga wawasan mendalam mengenai bagaimana proses due diligence dijalankan, apa saja yang harus diperiksa, dan bagaimana mengidentifikasi serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul.

68. Hukum Kepailitan

Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman menyeluruh tentang peraturan-peraturan yang mengatur kepailitan, mekanisme pengelolaan harta pailit, dan peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai prosedur hukum yang ditempuh dalam kasus kepailitan dan bagaimana hak-hak kreditur dan debitur dilindungi serta diatur oleh hukum.

69. Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional

Mata kuliah Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis dalam konteks global. Mata kuliah ini mencakup aspek hukum yang mengatur perdagangan internasional, investasi lintas negara, serta berbagai bentuk kontrak bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda.

70. Hukum Surat Berharga

Mata kuliah Hukum Surat Berharga memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum yang mengatur berbagai jenis surat berharga, seperti cek, wesel, promes, saham, dan obligasi. Mata kuliah ini membahas kerangka hukum, karakteristik, penerbitan, peredaran, serta penyelesaian sengketa terkait surat berharga, yang merupakan instrumen penting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum yang mengatur surat berharga sebagai alat pembayaran, investasi, dan pembiayaan. Mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis surat berharga, prosedur penerbitan, peredaran, dan penggunaan surat berharga dalam transaksi bisnis. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup analisis tentang hak dan kewajiban para pihak yang

terlibat, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam penggunaan surat berharga.

71. Hukum Investasi dan Pasar Modal

Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan investasi dan operasi pasar modal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mata kuliah ini mencakup regulasi yang mengatur investasi, peran lembaga-lembaga pasar modal, serta perlindungan hukum bagi investor dan penerbit. Mahasiswa akan mempelajari aspek hukum terkait berbagai instrumen investasi, termasuk saham, obligasi, reksa dana, serta mekanisme penawaran umum dan perdagangan sekuritas.

72. Hukum Perusahaan

Mata kuliah Hukum Perusahaan dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan operasional perusahaan. Mata kuliah ini mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mengatur perusahaan sebagai entitas bisnis, mulai dari pendirian, pengurusan, hingga pembubaran. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis badan hukum perusahaan seperti perseroan terbatas (PT), persekutuan, dan koperasi, serta memahami hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas isu-isu terkait tanggung jawab direksi dan komisaris, perlindungan hak pemegang saham, serta hubungan hukum perusahaan dengan pihak ketiga.

73. Hukum Kelembagaan Negara

Mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara berfokus pada pemahaman tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta hubungan antar lembaga dalam sistem pemerintahan. Mata

kuliah ini mencakup analisis mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur organisasi dan tata kelola lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki peran dalam penyelenggaraan negara.

74. Hukum Pengawasan Pemerintahan

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta mekanisme yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas prosedur penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek pengawasan, mulai dari lembaga pengawas independen, prosedur pengawasan, hingga upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pejabat publik.

75. Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian

Mata kuliah Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur status kewarganegaraan dan regulasi keimigrasian di suatu negara. Mata kuliah ini juga menjelaskan aspek hukum yang berkaitan dengan perolehan, kehilangan, dan hak-hak kewarganegaraan, serta kebijakan dan peraturan mengenai imigrasi, termasuk visa, izin tinggal, dan hak-hak imigran. Mahasiswa akan mempelajari prosedur hukum untuk memperoleh kewarganegaraan, serta regulasi dan praktik terkait pengelolaan imigrasi, termasuk pengajuan visa, izin tinggal, dan perlindungan hak-hak imigran.

76. Hukum Tata Negara Darurat

Mata kuliah Hukum Tata Negara Darurat berfokus pada kajian hukum yang mengatur penyelenggaraan negara dalam situasi darurat, termasuk keadaan darurat nasional atau regional. Mata kuliah ini membahas hukum yang mengatur keadaan darurat dalam sistem pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum yang mendasari deklarasi dan pengelolaan keadaan darurat, prosedur hukum yang harus diikuti, serta dampaknya terhadap struktur pemerintahan dan hak-hak individu. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup analisis kasus-kasus darurat dan evaluasi kebijakan darurat yang diterapkan di berbagai negara.

77. Hukum Pemerintahan Daerah

Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk otonomi daerah, struktur pemerintahan lokal, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip otonomi daerah, struktur dan fungsi pemerintahan daerah, serta hubungan hukum antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, mata kuliah ini mencakup regulasi tentang pembagian kewenangan, pengelolaan keuangan daerah, dan hak-hak serta kewajiban pemerintah daerah.

78. Hukum Pemilu

Mata kuliah Hukum Pemilu berfokus pada kajian hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), termasuk prinsip-prinsip dasar, prosedur, dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di suatu negara. Mata kuliah ini mencakup regulasi tentang pemilihan anggota legislatif, eksekutif, serta mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Mahasiswa akan mempelajari kerangka hukum pemilu, termasuk aturan tentang proses pemilihan, hak dan kewajiban pemilih dan calon, serta

mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Mata kuliah ini juga mencakup analisis sistem pemilihan, regulasi, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan pemilu.

79. Hukum Perjanjian Internasional

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur perjanjian internasional antara negara-negara atau entitas internasional lainnya. Mata kuliah ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian internasional, kewajiban negara-negara dalam perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian internasional. Mahasiswa akan mempelajari proses pembentukan perjanjian internasional, kewajiban dan hak negara-negara dalam perjanjian, serta mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian internasional. Mata kuliah ini juga mencakup analisis tentang implementasi dan interpretasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

80. Hukum Laut

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan dan pengelolaan wilayah laut. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum laut internasional, termasuk hak-hak negara di laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan maritim.

81. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional berfokus pada mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau antara negara dan entitas internasional lainnya. Mata kuliah ini mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa, baik yang bersifat litigasi di

pengadilan internasional maupun metode non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Mata kuliah ini juga mencakup analisis tentang peran lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa dan mekanisme untuk pelaksanaan keputusan.

82. Hukum Udara dan Angkasa

Mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa berfokus pada regulasi dan prinsip hukum yang mengatur penggunaan ruang udara dan luar angkasa. Mata kuliah ini mencakup aspek-aspek hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan penerbangan, eksplorasi luar angkasa, dan penggunaan teknologi terkait. Mahasiswa akan mempelajari berbagai peraturan dan konvensi internasional yang mengatur ruang udara dan luar angkasa, serta analisis tentang hak dan kewajiban negara dan entitas terkait dalam konteks penerbangan dan aktivitas luar angkasa.

83. Hukum Humaniter dan Kepengungsian

Tujuan mempelajari mata kuliah ini ialah: memahami prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan hukum kepengungsian. Menganalisis regulasi internasional yang mengatur perlindungan dalam situasi konflik dan kepengungsian. Mengevaluasi hak dan kewajiban negara serta entitas internasional terkait perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Menyusun dan menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan kemanusiaan dan pengungsi.

84. Hukum Diplomatik dan Konsuler

Mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan diplomatik antar negara, serta fungsi dan hak-hak konsuler. Mata kuliah ini mencakup aspek-aspek hukum internasional yang mengatur perwakilan diplomatik dan konsuler, termasuk hak istimewa dan

kekebalan diplomatik, serta tanggung jawab konsuler dalam melayani warga negara di luar negeri.

85. Perlindungan Konsumen

Mata kuliah ini membahas bagaimana regulasi dan kebijakan dapat melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil serta memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang aman dan berkualitas. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dan praktik perlindungan konsumen, termasuk regulasi, hak-hak konsumen, dan mekanisme untuk menangani sengketa. Mahasiswa akan mempelajari cara-cara untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan memahami peran hukum dalam menjamin keamanan dan kepuasan konsumen.

86. Hukum Perbankan

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum yang mengatur perbankan, termasuk regulasi, kewajiban, dan hak-hak yang berlaku dalam hubungan antara bank dan nasabah. Mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek hukum perbankan, termasuk struktur hukum lembaga keuangan, kontrak perbankan, serta masalah kepatuhan dan pengawasan.

87. Hukum Kekayaan Intelektual

Mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual berfokus pada aturan dan prinsip hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual di tingkat internasional. Mata kuliah ini mencakup peraturan mengenai hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, serta bagaimana hukum internasional mengelola dan melindungi kekayaan intelektual di berbagai negara. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana kekayaan intelektual dilindungi di berbagai negara dan bagaimana hukum internasional berperan dalam

mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia.

88. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Mata kuliah ini membahas hukum yang mengatur persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli serta persaingan tidak sehat. Mata kuliah ini mencakup aturan-aturan yang dirancang untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Mahasiswa akan mempelajari peraturan yang dirancang untuk menjaga kompetisi di pasar, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum persaingan usaha, dan memahami peran lembaga pengawas dalam penegakan hukum anti monopoli.

89. Hukum Pajak

Mata kuliah Hukum Pajak berfokus pada regulasi dan prinsip hukum yang mengatur sistem perpajakan, termasuk kewajiban pajak, hak-hak wajib pajak, serta mekanisme penegakan hukum pajak. Mata kuliah ini membahas aspek-aspek penting dari hukum pajak, termasuk pengaturan, administrasi, dan sengketa perpajakan. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dan aturan hukum yang mengatur perpajakan, termasuk kewajiban perpajakan bagi individu dan entitas, serta proses administrasi dan penegakan hukum pajak.

90. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Mata kuliah Hukum Pengadaan Barang dan Jasa berfokus pada regulasi dan prinsip hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan entitas publik. Mata kuliah ini mencakup aspek hukum dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta penanganan sengketa yang mungkin timbul. Mahasiswa akan mempelajari cara-

cara untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengadaan, serta bagaimana menangani sengketa yang mungkin terjadi dalam proses pengadaan.

91. Hukum Partai Politik

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dan regulasi hukum yang mengatur partai politik, termasuk proses pembentukan, pendaftaran, pendanaan, dan kegiatan partai politik. Dengan tujuan pembelajaran memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur partai politik dan aktivitas politik, menganalisis peraturan yang mengatur pembentukan, pendanaan, dan operasional partai politik. Mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan partai politik dan aktivitas politik. Mengembangkan keterampilan dalam menilai kepatuhan partai politik terhadap regulasi hukum yang berlaku.

92. Perbandingan Hukum Tata Negara

Mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara berfokus pada studi dan analisis perbandingan antara sistem hukum tata negara dari berbagai negara. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam struktur dan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara di berbagai yurisdiksi, serta dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari berbagai model dan praktik hukum tata negara, serta bagaimana sistem hukum tersebut mempengaruhi pengelolaan negara dan interaksi antar lembaga pemerintahan.

93. Hukum Organisasi Internasional

Mata kuliah ini membahas aspek hukum yang mengatur organisasi internasional, termasuk prinsip-prinsip dasar, pembentukan, struktur, dan fungsi organisasi internasional. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan organisasi

internasional, termasuk perjanjian internasional, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban negara-negara anggota. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana organisasi internasional beroperasi, bagaimana perjanjian internasional diatur, serta bagaimana hak dan kewajiban negara anggota ditegakkan.

94. Hukum Forensik dan Medikolegal

Mata kuliah Hukum Forensik dan Medikolegal membahas penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks forensik dan medikolegal. Mata kuliah ini mengintegrasikan aspek hukum dengan ilmu forensik dan medis untuk membantu dalam penyelesaian kasus hukum, terutama yang melibatkan bukti medis dan ilmiah. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana bukti forensik dan medis digunakan dalam proses hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum mengatur penggunaan dan interpretasi bukti tersebut.

95. Hukum dan Kewirausahaan

Mata kuliah ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan praktik kewirausahaan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi dan mengatur kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kewirausahaan, termasuk pembentukan dan pengelolaan perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, peraturan perjanjian bisnis, serta isu-isu hukum yang sering dihadapi oleh para wirausahawan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi kegiatan bisnis dan bagaimana mengelola risiko hukum dalam konteks kewirausahaan.

96. Hukum Militer

Mata kuliah Hukum Militer membahas sistem hukum yang mengatur aktivitas dan operasi angkatan bersenjata serta interaksi antara hukum militer dan hukum sipil. Mata kuliah ini mencakup prinsip-prinsip dasar hukum militer, peraturan yang berlaku untuk personel militer, dan hubungan antara hukum militer dan hukum internasional. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum militer berfungsi dalam konteks sistem hukum nasional dan internasional, serta perbedaan antara hukum militer dan hukum sipil.

97. Hukum Pembangunan Berkelanjutan

Mata kuliah ini membahas penerapan hukum dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berfokus pada prinsip-prinsip hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Mata kuliah ini membahas bagaimana kerangka hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan bagaimana mengatasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya.

98. Hukum dan Kecerdasan Buatan

Mata kuliah Hukum dan Kecerdasan Buatan (AI) berfokus pada interaksi antara hukum dan teknologi kecerdasan buatan. Mata kuliah ini membahas bagaimana hukum dapat mengatur dan mempengaruhi pengembangan serta penerapan teknologi AI, serta tantangan hukum dan etika yang muncul dari penggunaan AI dalam berbagai sektor. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum dapat mengatur inovasi teknologi AI dan bagaimana mengatasi isu-isu hukum serta etika yang timbul dari penggunaannya.

99. Legal Opinion

Mata kuliah Legal Opinion berfokus pada teknik dan metodologi dalam menyusun dan menilai pendapat hukum. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa bagaimana memberikan nasihat hukum yang efektif, menganalisis masalah hukum, dan menyusun dokumen legal opinion yang jelas dan komprehensif. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses pembuatan legal opinion, termasuk pengumpulan fakta, analisis hukum, dan penulisan dokumen. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana menyusun pendapat hukum yang akurat dan terperinci untuk membantu klien dalam membuat keputusan hukum yang informasional.

100. Legal Audit

Mata kuliah Legal Audit berfokus pada proses evaluasi dan penilaian kepatuhan hukum suatu organisasi atau entitas. Legal audit melibatkan pemeriksaan dan analisis sistem, prosedur, dan praktik hukum untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa bagaimana melakukan audit hukum yang efektif, mengidentifikasi risiko, dan merekomendasikan perbaikan.

101. Hukum Asuransi

Mata kuliah Hukum Asuransi berfokus pada aspek hukum yang terkait dengan industri asuransi, termasuk regulasi, kontrak, dan sengketa asuransi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur transaksi asuransi, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak asuransi, serta cara menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi transaksi asuransi dan bagaimana menangani isu-isu hukum yang terkait dengan asuransi.

102. Viktimologi

Mata kuliah Viktimologi berfokus pada studi tentang korban kejahatan, termasuk pengertian, dampak, dan penanganan korban kejahatan. Viktimologi mencakup analisis tentang bagaimana kejahatan mempengaruhi korban, serta upaya untuk mendukung dan melindungi mereka dalam sistem peradilan pidana. Mata kuliah ini membahas teori dan praktik viktimologi, yang mempelajari tentang korban kejahatan dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari cara menangani korban kejahatan, hak-hak mereka, serta peran sistem peradilan dan lembaga terkait dalam mendukung korban.

103. Hukum dan financial technology

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur sektor teknologi keuangan, termasuk regulasi, kepatuhan, dan tantangan hukum yang muncul dengan kemajuan teknologi. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mengatur teknologi keuangan dan bagaimana fintech mempengaruhi cara transaksi keuangan dilakukan serta dampaknya terhadap sistem keuangan dan hukum. Mata kuliah ini mengeksplorasi bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi regulasi, praktik hukum, dan industri keuangan secara keseluruhan.

104. Hukum Transportasi dan Pengangkutan

Mata kuliah Hukum Transportasi dan Pengangkutan berfokus pada aspek hukum yang mengatur berbagai aspek transportasi dan pengangkutan, termasuk regulasi, kontrak, dan tanggung jawab hukum. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi kegiatan transportasi dan pengangkutan baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi

industri transportasi dan pengangkutan serta cara menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam konteks tersebut.

105. Hukum Pers

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum yang mengatur pers dan media massa, termasuk hak kebebasan berpendapat, regulasi media, dan tanggung jawab hukum media. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi praktik pers, serta hak dan kewajiban jurnalis dan media dalam menyajikan informasi kepada publik.

106. Hukum Perjanjian Kredit

Mata kuliah Hukum Perjanjian Kredit berfokus pada aspek hukum yang mengatur perjanjian kredit, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi kredit, baik untuk individu maupun perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perjanjian kredit dan bagaimana menangani masalah hukum terkait dengan transaksi kredit.

107. Tindak Pidana Khusus

Mata kuliah Tindak Pidana Khusus berfokus pada jenis-jenis kejahatan yang memerlukan penanganan hukum khusus karena sifatnya yang unik atau kompleks. Mata kuliah ini mencakup analisis mendalam tentang berbagai bentuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan umum, termasuk peraturan, penyidikan, dan penuntutannya. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik kejahatan tersebut, hukum yang berlaku, serta teknik-teknik penyidikan dan penuntutan yang diterapkan.

108. Magang

Mata kuliah ini berfokus pada pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa di lapangan, di mana mereka dapat menerapkan pengetahuan hukum yang telah dipelajari dalam konteks profesional. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja, mengembangkan keterampilan praktis, dan mempersiapkan mahasiswa untuk karier di bidang hukum atau profesi terkait.

109. Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Mata kuliah ini mencakup persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pengalaman pertukaran mahasiswa, serta integrasi pembelajaran yang diperoleh selama program ke dalam kurikulum akademik. Mata kuliah ini menyediakan landasan teoritis dan praktis bagi mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pertukaran. Mahasiswa akan belajar tentang persiapan dan pelaksanaan pertukaran, pengalaman belajar di lingkungan baru, serta refleksi dan integrasi hasil belajar dari program pertukaran ke dalam studi mereka.

110. Kampus Mengajar

Mata kuliah Kampus Mengajar dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam dunia pendidikan melalui program pengajaran di sekolah-sekolah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah.

111. Riset

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam tentang prinsip dan metode riset ilmiah. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teknik penelitian, mulai dari

perumusan masalah, desain penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga penulisan laporan hasil penelitian. Mata kuliah ini biasanya mencakup metodologi riset, teknik pengumpulan data, serta analisis dan interpretasi hasil penelitian.

112. KKN Tematik

Mata kuliah KKN Tematik (Kuliah Kerja Nyata Tematik) adalah bagian dari program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial di komunitas dengan fokus pada tema atau isu tertentu. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam pengelolaan proyek sosial dan komunikasi.

113. Studi Independen

Mata kuliah ini memberi mahasiswa kebebasan untuk merancang dan melaksanakan proyek atau penelitian yang relevan dengan bidang studi mereka atau minat pribadi mereka, di bawah bimbingan dosen. Mahasiswa akan bekerja secara mandiri untuk menyelesaikan proyek atau studi yang telah disepakati, serta melaporkan kemajuan dan hasilnya secara berkala.

114. Kegiatan Kewirausahaan

Mata kuliah Kegiatan Kewirausahaan dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam menjalankan dan mengelola kegiatan kewirausahaan. Mata kuliah ini menggabungkan teori kewirausahaan dengan pengalaman langsung dalam merancang dan melaksanakan usaha atau proyek bisnis.

115. Proyek Kemanusiaan

Mata kuliah Proyek Kemanusiaan dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman praktis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan masalah kemanusiaan. Mata kuliah ini sering kali berfokus pada proyek-proyek yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan, pengembangan masyarakat, dan tanggap bencana.

116. IISMA

IISMA (Indonesian International Student Mobility Awards) adalah program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia untuk melakukan mobilitas internasional di universitas atau lembaga pendidikan di luar negeri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman internasional mahasiswa, memperluas wawasan mereka, serta memperkuat hubungan antara perguruan tinggi di Indonesia dan institusi pendidikan global. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung mahasiswa yang mendapatkan beasiswa IISMA dengan mengintegrasikan pengalaman mobilitas internasional mereka ke dalam kurikulum akademik mereka. Mata kuliah ini memfokuskan pada pembelajaran dari pengalaman internasional, penyesuaian budaya, dan penerapan pengetahuan yang diperoleh selama studi di luar negeri.

117. Tugas Akhir (Skripsi, Jurnal, Memorandum Hukum)

Mata kuliah ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka sebagai syarat kelulusan. Mata kuliah ini memberikan bimbingan dan dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian Skripsi, Jurnal, atau Memorandum Hukum, tergantung pada pilihan program studi dan jenis tugas akhir yang dipilih. Tujuannya mengidentifikasi dan merumuskan topik penelitian yang relevan dan signifikan, melaksanakan penelitian atau analisis secara sistematis dan

metodis, menyusun laporan akhir yang memenuhi standar akademik dan profesional. menyajikan dan membela hasil penelitian atau analisis secara efektif. Tugas akhir dapat diujikan setelah 2 bulan sejak diujikannya proposal.

C. Deskripsi Satuan Kredit Semester (SKS)

Deskripsi 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah responsif atau tutorial, terdiri atas:

1. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester meliputi penyelesaian tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; dan
3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dan atau kelompok untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.

D. Pembelajaran dan Pemantauan Studi

1. Penilaian
 - a. Penilaian setiap mata kuliah meliputi 4 (empat) komponen:
 - 1) Presensi (75% kehadiran sebagai syarat mengikuti ujian): 0
 - 2) Aktifitas Partisipatif: 15%
 - 3) Hasil Proyek: 35%
 - 4) Tugas (Mandiri & Kelompok): 10%
 - 5) UTS (Ujian Tengah Semester): 15%
 - 6) UAS (Ujian Akhir Semester): 25%

Dalam perkuliahan, terdapat matakuliah-matakuliah tertentu yang sudah ditetapkan oleh Fakultas dengan menggunakan metode Case Study, Project Based Learning dan Problem Based Learning. matakuliah dengan metode PBL mempunyai sistem penilaian tersendiri, yaitu:

Kegiatan	Deskripsi
Aktivitas Partisipatif	Kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas
Hasil Proyek	Penyelesaian masalah secara berkelompok bagi mahasiswa yang cukup kompleks berkolaborasi dengan dosen dipresentasikan didepan kelas dilanjutkan dengan diskusi yang konstruktif
Tugas	Tugas mandiri berupa penyelesaian masalah ataupun soal kasus yang diberikan oleh dosen pengampu sesuai dengan topik perkuliahan dalam pertemuannya
Quiz	Evaluasi Dosen pada pertemuan sebelum UTS atau UAS berupa pilihan berganda secara offline maupun online melalui aplikasi (Quizizz, kahoot, travelo dan lain lain) ataupun essay
UTS	bentuk evaluasi semester yang berjalan dengan menekankan pada aspek kognitif mahasiswa
UAS	bentuk evaluasi akhir mata kuliah yang menekankan pada aspek kognitif untuk

	menentukan kelulusan mahasiswa pada tiap mata kuliah.
--	---

2. Pengaturan mengenai tata tertib ujian di Fakultas Hukum dituangkan dalam bentuk kebijakan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
3. Pembelajaran sistem SKS, masa pembelajaran adalah semester ganjil, semester genap dan semester Antara sesuai ketentuan. Kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan tugas terstruktur. Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Komprehensif (sidang proposal dan sidang skripsi). Penilaian lulus ujian adalah sebagai berikut:

Huruf	Nilai Angka	Angka Mutu	Sebutan Mutu
A	85 - 100	4.00	Dengan pujian
A-	80 - 84.99	3.75	Sangat baik sekali
B+	75 - 79.99	3.50	Baik sekali
B	70 - 74.99	3.00	Baik
B-	65 - 69.99	2.75	Cukup baik
C+	60 - 64.99	2.50	Lebih dari cukup
C	55 - 59.99	2.00	Cukup
D	40 - 54.99	1.00	Kurang
E	Kurang dari 40	0.00	Gagal

1. Beban Studi dan Masa Studi
 - a. Ketentuan beban kredit dan masa studi Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ

1	Jumlah maksimum SKS per semester	24 sks
---	----------------------------------	--------

2	Beban minimum SKS per mata kuliah	2 sks
3	Batas maksimum SKS per mata kuliah	4 sks
4	Batas minimum jumlah semester	7 semester
5	Batas maksimum jumlah semester	14 semester
6	Batas maksimum cuti akademik	2 semester
7	Total jumlah tempuh minimum sks	146 sks

- b. Ketentuan jumlah sks yang diambil setiap semester berdasarkan IP (Indeks Prestasi) dari KHS (Kartu Hasil Studi) terakhir.

INDEKS PRESTASI	SKS MAKSIMUM YANG DAPAT DIAMBIL DI SEMESTER YANG AKAN DATANG
1.50- kebawah	12 SKS
1.50 - 1.49	15 SKS
2.00 – 2.49	18 SKS
2.50 – 2.99	21 SKS
3.00 - keatas	24 SKS

- c. Ketentuan beban studi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

NO	KELOMPOK MATA KULIAH	BEBAN KREDIT (SKS) PROGRAM KONSENTRASI							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	MK. Wajib Universitas	6					8		

2	MK. Wajib Program Studi	14	20	20	16		6	12	4
3	MK. Wajib Program Konsentrasi (PK)				4		4	4	
4	MK. Pilihan						4	4	
5	MK. PLU					20			
	JUMLAH	20	20	20	20	20	22	20	4

- d. Yudisium nilai kelulusan dinyatakan dengan predikat :
- 1) IPK 2,76 – 3,00 lulus dengan predikat “MEMUASKAN”
 - 2) IPK 3,01 – 3,50 lulus dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN”
 - 3) IPK 3,51 – 4,00 lulus dengan predikat “DENGAN PUJIAN/CUMLAUDE”

E. Administrasi Akademik

1. Registrasi Akademik:
 - a. Registrasi akademik adalah Kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.
 - b. Layanan akademik dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang dapat di akses pada website <http://akademik.upnvj.ac.id>
 - c. Syarat melakukan registrasi akademik telah melakukan atau menyelesaikan registrasi administratif dan dengan status mahasiswa aktif.
 - d. Untuk melaksanakan registrasi akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen *user manual* yang berisi penjelasan ringkas

tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIKAD) Universitas baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.

e. Kegiatan Perbaikan Rencana Studi (KPRS) dapat dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan mata kuliah yang diambil dalam KRS atau jumlah sksnya melebihi batas maksimum pengambilan. Perubahan KRS harus seijin PA dan disahkan oleh Kaprodi;

- 1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 1 (satu) semester berstatus tidak terdaftar kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Dekan.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri atau berhenti sebagai mahasiswa.
- 3) Pengunduran diri mahasiswa atau berhenti sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- 4) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban keuangan, secara otomatis tidak dapat mengisi KRS secara *online*.
- 5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi wajib mengajukan permohonan cuti akademik ke Dekan.
- 6) Mahasiswa yang tidak registrasi dan tidak mengajukan cuti akademik dinyatakan sebagai Mahasiswa Non Aktif dan kepadanya dikenakan kewajiban keuangan secara penuh.

2. Pembimbingan Akademik

- a. Pembimbingan akademik dilakukan oleh seorang pembimbing akademik yaitu, dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
- b. Pembimbingan akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal 3 kali per semester yaitu pada saat pengambilan matakuliah oleh mahasiswa, *Review* proses pembelajaran sebelum ujian tengah semester dan *review* proses pembelajaran untuk persiapan ujian akhir semester.
- c. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:
 - 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikan
 - 2) Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif
 - 3) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studinya.
- d. Jadwal pembimbingan akademik sesuai dengan yang tercantum dalam kalender akademik.
- e. Pemantauan studi dilakukan setiap semester. Pemantauan dilakukan oleh Kaprodi dan pimpinan fakultas dibantu oleh dosen Dosen Pembimbing Akademik. Prestasi akademik per-semester minimal IPK 2.00 dan 12 sks persemester. Mahasiswa terancam putus studi apabila prestasinya di bawah standar minimal. Mahasiswa di bawah prestasi minimal dapat diberikan masa semester percobaan sampai pada semester ketiga dan/atau keempat.

- f. Mahasiswa dapat dinyatakan putus studi pada akhir semester 4 atau 8 atau 14 karena tidak memenuhi prestasi akademik minimal berdasarkan evaluasi bersama antara pimpinan fakultas, ketua program studi dan Dosen Pembimbing Akademik.
- g. Surat keterangan pernah kuliah diberikan kepada mahasiswa yang putus studi/mengundurkan diri.
- h. Pengunduran diri dapat diajukan oleh mahasiswa setiap waktu selama masih dalam batas masa studi.
- i. Pembimbingan akademi mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah
 - 2) Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - 3) Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.

3. Ketentuan Perkuliahan Kelas

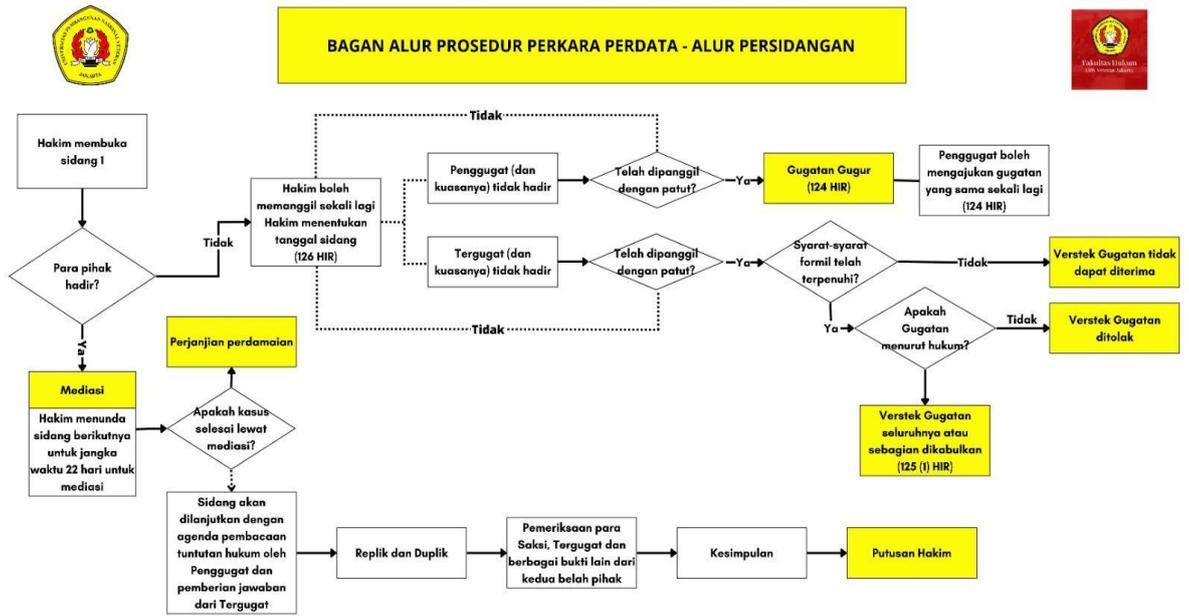
Sebelum dilakukan proses belajar mengajar, sebelumnya dilakukan kesepakatan kontrak perkuliahan anatara dosen dan mahasiswa yang berisi:

- a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan
- b. Perkuliahan dengan kode ruangan menggunakan VCR maka dilaksanakan secara online, dengan kode ruang kelas dilaksanakan secara offline
- c. Mahasiswa wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman ketika melaksanakan komunikasi antar individu (*Social/Physical distancing*), sudah di vaksin minimal 2 kali dan memiliki aplikasi PeduliLindungi

- d. Mahasiswa wajib masuk ke kelas tepat waktu dan diberikan toleransi selambat-lambatnya 10 menit dari jadwal yang ditentukan.
- e. Apabila setelah 10 Menit mahasiswa masih ada yang terlambat, maka mahasiswa dianggap tidak hadir;
- f. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan paling lama 10 menit sebelum perkuliahan berakhir
- g. Setiap perkuliahan Mahasiswa mengikuti Pretest dan Posttest yang disediakan dosen;
- h. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan (berkemeja /batik) dan memakai sepatu;
- i. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan Tanpa seizin Dosen
- j. Mahasiswa wajib membaca buku ajar, modul, peraturan perundang-undangan atau materi lainnya yang sudah di upload Dosen di <https://leads.upnvj.ac.id/my/>
- k. Mahasiswa wajib menonton Video Pembelajaran yang di upload di <https://leads.upnvj.ac.id/my/> atau di Chanel youtube fh upnvj
- l. Mahasiswa yang berhalangan hadir, wajib memberikan bukti surat atau keterangan lain kepada dosen melalui ketua kelas yang bersangkutan sebelum perkuliahan dimulai atau maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kuliah.

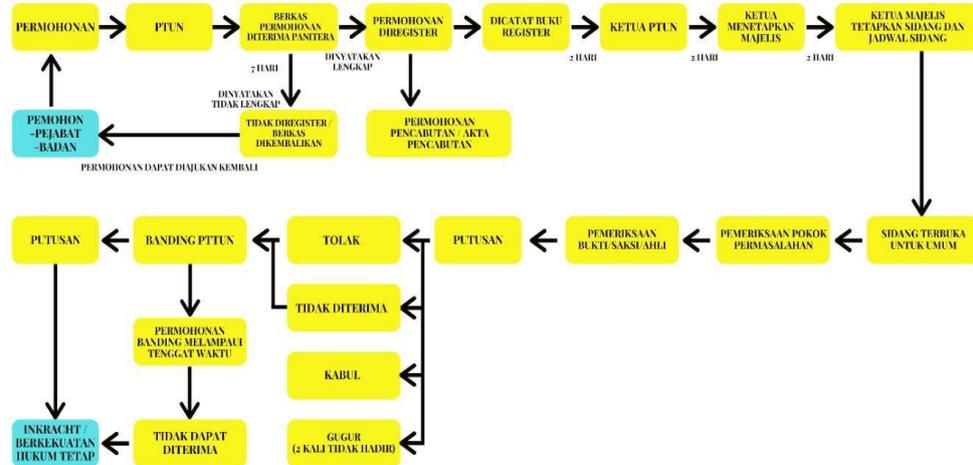
4. Ketentuan Laboratorium

Terdapat 2 ruang Laboratorium FH UPNVJ yang dipergunakan untuk praktek simulasi sidang perkara perdata, perkara pidana, dan perkara peradilan tata usaha Negara.





ALUR BERACARA PERMOHONAN PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG



5. Tata Cara Pengisian KRS

- a. Mahasiswa mencetak dan membawa Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester yang bersangkutan
- b. Mahasiswa konsultasi pengisian KRS ke Dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan membawa *print out* KHS dan KRS
- c. Mahasiswa mengisi Form Isian KRS.
- d. Form Isian KRS yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Dosen PA, Mahasiswa dan Kaprogdi.
- e. Dosen PA membuka kunci pengisian KRS di SIAKAD.
- f. Mahasiswa menginput KRS secara online berdasarkan Form Isian KRS yang sudah di validasi oleh Dosen PA.
- g. Mahasiswa mencetak KST (Kartu Studi Tetap).
- h. Mahasiswa membawa Form Isian KRS yang sudah di validasi Dosen PA dan *print out*/mengirimkan soft copy KST ke Kaprodi untuk di tandatangani.
- i. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal kuliah yang tercantum di KST.

- j. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu yang ditentukan, mengajukan Surat Permohonan Cuti Akademik kepada Dekan FH UPNVJ.

6. Mahasiswa Cuti Akademik:

a. Pengertian

Cuti akademik adalah status mahasiswa tidak aktif kuliah (cuti) yang resmi disetujui Dekan melalui surat keputusan Dekan. Cuti akademik bagi mahasiswa tidak mempengaruhi masa studi yang telah ditetapkan. Cuti akademik tidak dapat dilakukan selama 2 (dua) semester berturut-turut.

b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa
- 2) Telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
- 3) Telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut untuk cuti akademik pertama kali.
- 4) Tidak mempunyai tunggakan kewajiban keuangan.
- 5) Mahasiswa dengan alasan yang kuat yang ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan cuti akademik maksimum 2 (dua) semester selama masa studi baik berturut-turut maupun tidak.

c. Pelaksanaan

- 1) Mahasiswa yang ingin menghentikan studi sementara pada suatu semester tertentu karena alasan yang kuat harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan beban 0 (nol) SKS.
- 2) Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Cuti Akademik kepada Dekan setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA).

- 3) Mengajukan permohonan cuti selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang (mengisi KRS) untuk semester berikutnya.
- 4) Dekan mengeluarkan Surat Keputusan Cuti Akademik dan melaporkan kepada Rektor dengan tembusan Biro Administrasi Akademik.
- 5) Mahasiswa tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan 0 (nol) sks.
- 6) Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi akademik hanya diizinkan mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan melakukan prosedur cuti akademik , ditambahkan batas waktu pengajuan studi sementara.
- 7) Bagi mahasiswa yang sedang cuti akademik, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, administrasi dan mengikuti organisasi kemahasiswaan.
- 8) Apabila cuti akademik dilaksanakan pada semester 2 (dua) karena suatu hal, kewajiban keuangan tetap diberlakukan.
- 9) Pejabat yang berhak memutuskan status mahasiswa di UPN Veteran Jakarta adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut.

7. Mahasiswa Aktif Kembali setelah Cuti Akademik

Apabila masa cuti akademik berakhir dan mahasiswa akan aktif kembali wajib daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan dengan melampirkan surat keterangan cuti akademik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti akademik berakhir.

- b. Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan yang menjadi kewajibannya.
 - c. Dekan memberikan surat keterangan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi mahasiswa bersangkutan.
 - d. Bila dalam melakukan registrasi akademik terjadi keterlambatan melebihi batas akhir pengisian KRS maka mahasiswa dikenakan sanksi berupa perpanjangan cuti akademiknya secara otomatis dengan malunasi kewajiban keuangan dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
8. Mahasiswa Tidak Aktif Tanpa Keterangan
- a. Pengertian
Yang dimaksud dengan mahasiswa tidak aktif tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester tanpa keterangan.
 - b. Persyaratan
Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM
 - c. Pelaksanaan
 - 1) Mahasiswa yang tidak aktif kuliah tanpa keterangan dalam semester tertentu diperhitungkan dalam batas masa studi.
 - 2) Batas waktu tidak aktif paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - 3) Jika tidak aktif lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
 - 4) Dekan mengajukan usulan surat pemberhentian bagi mahasiswa tidak aktif melebihi 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan.
 - d. Aktif Kembali

Apabila mahasiswa tidak aktif tanpa keterangan selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester berturut-turut dan ingin aktif kembali maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan 2 (dua) minggu sebelumnya berakhirnya heregistrasi dalam semester bersangkutan untuk mendapatkan pemulihan statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
- 2) Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan setelah mendapatkan pemulihan statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Dekan.
- 3) Dekan memberikan surat persetujuan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dan masa studi mahasiswa yang bersangkutan serta beberapa pertimbangan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk aktif kembali.

9. Mahasiswa terkena Skorsing

a. Pengertian

Mahasiswa terkena skorsing adalah mahasiswa yang karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan/tata tertib sehingga dijatuhi hukuman sanksi akademik berupa skorsing yaitu larangan mengikuti seluruh kegiatan akademik selama dalam waktu tertentu.

b. Persyaratan

Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.

c. Pelaksanaan

- 1) Bagi Mahasiswa yang terkena skorsing, masa studi selama menjalani skorsing tetap diperhitungkan.
- 2) Jika masa skorsing selesai, mahasiswa wajib melapor kepada Dekan.

d. Aktif Kembali

Apabila mahasiswa terkena skorsing dan ingin aktif kembali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang (heregistrasi) dalam semester yang bersangkutan untuk mendapatkan pemulihan status mahasiswa.
- 2) Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan.
- 3) Dekan memberikan surat persetujuan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan dan beberapa pertimbangan lain.

10. Tugas Akhir Mahasiswa

- a. Yang dimaksud dengan Tugas Akhir mahasiswa karya tulis berbasis penelitian ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional yaitu dalam bentuk Skripsi, Artikel Ilmiah dan Memorandum Hukum.
- b. Bobot satuan kredit semester (SKS) Tugas Akhir adalah 4 sesuai yang tercantum dalam kurikulum.
- c. Ketentuan teknis penulisan tugas akhir diatur dalam pedoman tersendiri yang dibuat oleh program studi.
- d. Mata kuliah tugas akhir harus lulus dimana nilai kelulusan minimal adalah B.
- e. Penyusunan tugas akhir didahului dengan penyusunan proposal tugas akhir.
- f. Dalam penyusunan proposal tugas akhir mahasiswa harus telah menyelesaikan 90 SKS, telah menempuh matakuliah prasyarat.

11. Menunggu Tugas Akhir

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan mahasiswa menunggu tugas akhir adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik tetapi belum menyelesaikan tugas akhir.

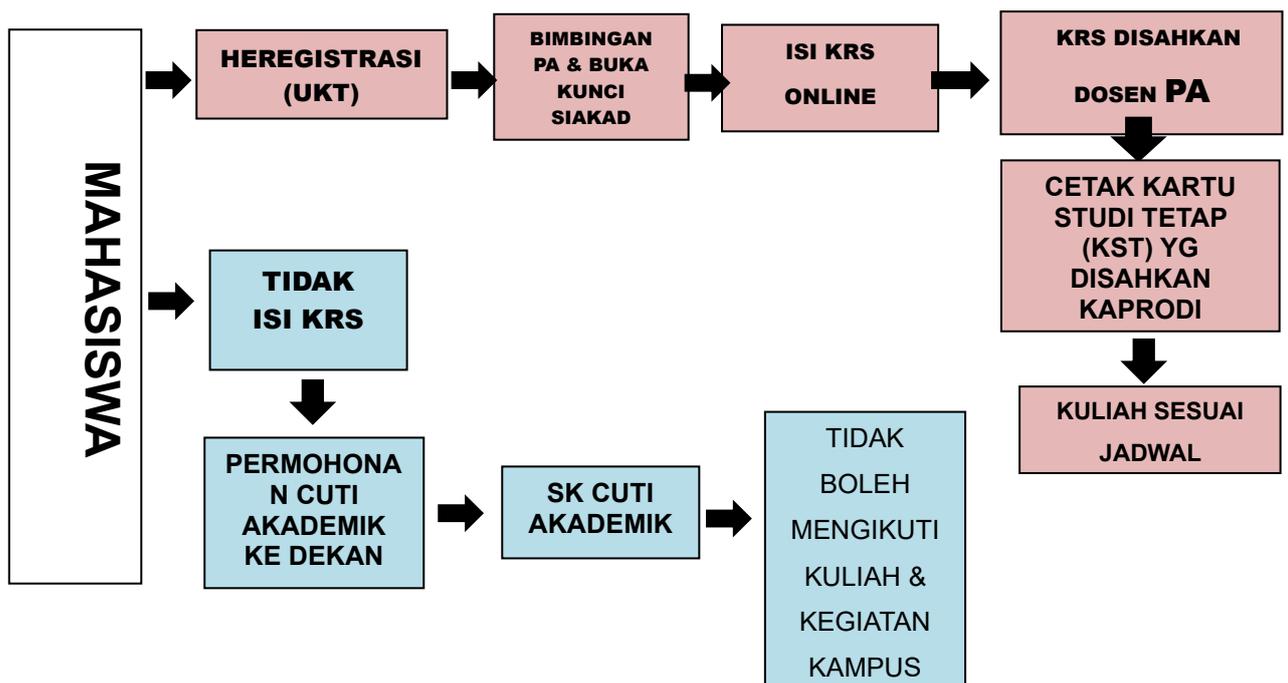
b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memiliki NIM
- 2) Telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dan kewajiban keuangan tetapi belum menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

c. Pelaksanaan

- 1) Mahasiswa yang menunggu tugas akhir dalam semester tertentu bukan atas kelalaiannya maka studi tetap diperhitungkan.
- 2) Batas waktu menunggu tugas akhir paling lama jumlah semester yang tertinggal dalam batas masa studi

BAGAN ALUR KEGIATAN AKADEMIK





**1 BULAN SEBELUM
CUTI AKADEMIK
BERAKHIR
MENGAJUKAN
PERMOHONAN AKTIF
KEMBALI KE DEKAN**

BAB IV

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

A. Keuangan

Biaya kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun sejak 2015/2016 sudah mengadopsi uang kuliah tunggal (UKT) yang digolongkan berdasar Kelompok penghasilan orang tua. Biaya kuliah ini diberlakukan untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.

B. Administrasi Umum

1. Mahasiswa Mengundurkan Diri

a. Pengertian

Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa karena alasan tertentu meminta berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa.

b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.

c. Pelaksanaan

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai cukup kepada Dekan.
- 2) Mendapat persetujuan dari Rektor atas usulan Dekan.
- 3) Melunasi semua kewajiban keuangan sebelum pengunduran diri.
- 4) Diberikan surat keterangan dan hak atas Kartu Hasil Studi.

2. Evaluasi Akademik Mahasiswa

- a. Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan akan dilakukan evaluasi pada tahapan semester, dan jika tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi pemberhentian studi tetap (DO/Drop Out).
- b. Evaluasi dilakukan pada mahasiswa program studi hukum program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2.00 dengan ketentuan:

No	Semester	Minimal SKS Ditempuh	Keterangan
1	Dua Semester tahun pertama	20	
2	Empat semester tahun kedua	40	
3	Enam semester tahun ketiga	60	
4	Delapan semester tahun keempat	80	
5	Sepuluh semester tahun kelima	100	
6	Dua belas semester tahun keenam	120	
7	Empat belas semester tahun ketujuh	146	Termasuk 4 SKS Tugas Akhir

3. Mahasiswa Drop Out
 - a. Pengertian

Mahasiswa Drop Out adalah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik dalam batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan.

b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.
- 3) Telah habis masa studinya.
- 4) Tidak mungkin untuk diperpanjang masa studinya didasarkan atas evaluasi akademik.

c. Pelaksanaan

- 1) Dekan memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pemberitahuan dan pengarahan secara lisan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan terkena sanksi DO.
- 2) Dekan mengajukan surat usulan kepada Rektor perihal (Drop Out, DO) mahasiswa tersebut dari status sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
- 3) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Drop Out (DO).
- 4) Diberikan surat keterangan dan hak atas KHS setelah memenuhi seluruh kewajiban keuangan.

4. Mahasiswa Diberhentikan

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan mahasiswa diberhentikan adalah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi karena melanggar ketentuan dengan hukuman berat dan dicabut status kemahasiswaannya sesuai dengan peraturan tata tertib Universitas.

b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.
- 3) Melakukan kesalahan atau tindakan kriminal dengan hukuman berat.

c. Pelaksanaan

- 1) Dekan membentuk komisi disiplin Fakultas
- 2) Komisi disiplin Fakultas mengusulkan sanksi atas pelanggaran kepada Rektor melalui Dekan.
- 3) Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan.
- 4) Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin lanjutan.
- 5) Rektor mengeluarkan surat keputusan pemberhentian.
- 6) Diberikan surat keterangan pemberhentian dan hak atas KHS.

BAB V

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A. Pembinaan Mahasiswa

Pembinaan mahasiswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Mahasiswa diharapkan aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional yang dilaksanakan didalam kampus maupun diluar kampus dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan SKS.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0155/U/1998, kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang penalaran dan keilmuan misalnya seminar, lokakarya, symposium dan sebagainya.
2. Bidang minat/bakat dan kegemaran dalam rangka peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan kesegaran jasmani yang meliputi kegiatan olah raga, pencinta alam, pencinta kesadaran hukum dan sebagainya.
3. Bidang kesejahteraan mahasiswa yang meliputi pemberian beasiswa, kegiatan kerohanian, bursa hukum dan sebagainya.
4. Bidang pengabdian kepada masyarakat misalnya bakti sosial, penyuluhan hukum dan sebagainya.

B. Tujuan Pembinaan Kemahasiswaan

1. Memperluas wawasan berpikir mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan misalnya latihan kepemimpinan mahasiswa, penelitian dan forum diskusi ilmiah.

2. Meningkatkan dorongan dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan kerohanian, olah raga dan kesenian.
3. Mematangkan kepribadian dan integritas mahasiswa.

C. Badan-Badan Kemahasiswaan

Badan-Badan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta meliputi :

1. Senat Mahasiswa (SM)

Senat Mahasiswa adalah badan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang bertugas:

- a. Menetapkan garis-garis besar program, membuat kebijakan, peraturan, putusan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- b. Memberikan saran, pendapat serta usul kepada pimpinan fakultas. Keberadaan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang berlaku selama setahun, sehingga setiap tahun surat keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tersebut harus diperbaiki sesuai dengan pengurus yang baru.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah badan yang bertugas merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan garis-garis besar program yang telah ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam melaksanakan program kerjanya, Badan Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh badan-badan kelengkapan lainnya. Keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN

Veteran Jakarta disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang berlaku selama setahun.

3. Kegiatan-kegiatan Mahasiswa

a. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru sehingga menjadi proses adaptasi dengan pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa senior dan unsur lain yang terkait di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti diwajibkan mengulang di kegiatan tahun berikutnya.

b. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM)

Kegiatan ini adalah wadah kegiatan akademik di bidang riset dan debat mahasiswa yang memiliki fungsi menghidupkan iklim akademik di kalangan mahasiswa. FRDM aktif menjadi duta fakultas dalam even-even perlombaan di bidang riset dan debat di tingkat nasional hingga internasional.

c. Unit Peradilan Semu (UPS)

Kegiatan ini merupakan kegiatan akademik yang dikelola mahasiswa dalam bidang praktek beracara persidangan. UPS mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai kompetisi *moot court* tingkat nasional dan internasional.

d. Forum Komunikasi Islam Al-Hakim

Kegiatan ini merupakan kegiatan mahasiswa yang berorientasi kepada pembinaan karakter keagamaan dan sebagai bagian dari proses pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Forum Komunikasi Islam menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa melaksanakan kegiatan terutama yang terkait dengan hari-hari besar keagamaan.

e. Karya Mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah latihan kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, bakti sosial serta penelitian.

f. Kegiatan Lain

Kegiatan yang bertujuan menyalurkan minat dan wawasan berfikir seperti kesenian / apresiasi seni, keagamaan, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan hukum, penelitian dan lain-lain.

D. Kesejahteraan Mahasiswa

1. Bimbingan dan Konseling

Kegiatan ini membantu mahasiswa dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik maupun non akademik. Setiap mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing mahasiswa atau Pembimbing Akademik.

2. Internet

3. Poliklinik Kampus

4. LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum)

5. Perpustakaan Pusat & Fakultas.

6. Beasiswa

a. Beasiswa BIDIK MISI.

b. Beasiswa Program Peningkatan Akademik Dan Bantuan Belajar Mahasiswa (PPA dan BBM)

c. Beasiswa kerja sama dengan University of Economic and Law, Vietnam

d. Beasiswa Bank Indonesia

e. Yayasan Beasiswa Jakarta

f. Beasiswa Unggulan

g. Beasiswa yang berasal dari perusahaan-perusahaan nasional.

E. Alumni Dan Kemitraan Orang Tua

1. Alumni

Alumni adalah lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Alumni Fakultas terhimpun didalam ikatan Lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ikatan alumni bertujuan antara lain untuk membina hubungan diantara para alumnus dan membantu fakultas dalam meningkatkan kualitas akademik. Disamping itu Alumni sebagai Mitra Fakultas, yang telah difungsikan sebagai pimpinan dan tenaga pengajar di FH, sebagai penyalur lulusan FH dalam mencari pekerjaan dan sebagai mitra pengembangan FH UPN Veteran Jakarta.

2. Kemitraan dengan orang tua mahasiswa

Kemitraan dengan orang tua mahasiswa adalah hubungan kerja sama yang saling membantu guna keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Disamping itu fakultas ingin meningkatkan peran orang tua mahasiswa melalui wadah orang tua mahasiswa.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan segala fasilitasnya, namun ditentukan juga oleh faktor di luar itu. Keberadaan orang tua dan partisipasinya dalam sistem SKS sangat berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran. Karena itu, melalui pedoman ini diharapkan timbul kebersamaan yang saling bersinergi antara dosen, mahasiswa dan orang tua, sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi harapan bersama.

Jakarta, 12 Agustus 2024

Dekan,



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP 19700606022021211004